



**SEKRETARIAT**

**TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

**Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia**

Jl. Kebon Sirih No. 14 Jakarta Pusat 10110

Telp : 021-3912812

Faks : 021-3912-511 dan 021-391-2513

E-Mail : sekretariat@tnp2k.go.id

Website : [www.wapresri.go.id](http://www.wapresri.go.id)



SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA



# INDIKATOR KESEJAHTERAAN DAERAH **PROVINSI PAPUA BARAT**



TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN





SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

# INDIKATOR KESEJAHTERAAN DAERAH **PROVINSI PAPUA BARAT**



TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

**Judul: Indikator Kesejahteraan Daerah  
Provinsi Papua Barat**

Disusun dan Diterbitkan oleh:  
Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)

Cetakan Pertama, November 2011

Hak Cipta dilindungi Undang-undang.  
© 2011 Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)  
Foto Cover: denniskututung.wordpress.com, dievitanz.blogspot.com

Korespondensi : Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan  
Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia  
Jl. Kebon Sirih No. 14 Jakarta Pusat 10110  
Telp. 021-3912812  
Fax. 021-3912-511 dan 021-391-2513  
E-mail: sekretariat@tnp2k.go.id  
Website: www.wapresri.go.id



## DAFTAR SINGKATAN

ADHK	: Atas Dasar Harga Konstan
AKB	: Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup
APK	: Angka Partispasi Kasar
APM	: Angka Partisipasi Murni
BLM	: Bantuan Langsung Masyarakat
BPS	: Badan Pusat Statistik
CFSI	: <i>Composite Food Security Index</i>
DKP	: Dewan Ketahanan Pangan
FIA	: <i>Food Insecurity Atlas</i>
FSVA	: <i>Food Security and Vulnerability Atlas</i>
HDI	: <i>Human Development Index</i>
IPKM	: Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
KUR	: Kredit Usaha Rakyat
MA	: Madrasah Aliyah
MI	: Madrasah Ibtidaiyah
MTS	: Madrasah Tsanawiyah
NTP	: Nilai Tukar Petani
PBB	: Perserikatan Bangsa Bangsa
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
PNPM	: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Riskesdas	: Riset Kesehatan Dasar
SAKERNAS	: Survey Angkatan Kerja Nasional
SD	: Sekolah Dasar
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SUSENAS	: Survey Sosial Ekonomi Nasional
TNP2K	: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
TPAK	: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPT	: Tingkat Pengangguran Terbuka
WFP	: <i>World Food Programme</i>



## DAFTAR ISI

Daftar Singkatan.....	iii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel .....	v
Daftar Gambar.....	vi
Pertumbuhan Ekonomi.....	1
Inflasi.....	4
Nilai Tukar Petani.....	5
Tingkat Kemiskinan .....	6
Indikator Kemiskinan .....	7
Program Penanggulangan Kemiskinan .....	8
Tingkat Pengangguran dan Ketenagakerjaan.....	9
Bidang Kesehatan .....	11
Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat.....	15
Bidang Pendidikan.....	17
Akses Terhadap Air Bersih .....	19
Akses Terhadap Sanitasi.....	20
Indeks Pembangunan Manusia.....	21
Komponen Indeks Pembangunan Manusia .....	22
Ketahanan Pangan.....	23
Prioritas Bidang Pendidikan .....	26
Prioritas Bidang Kesehatan.....	28
Prioritas Bidang Infrastruktur Dasar .....	31
Prioritas Bidang Ketenagakerjaan .....	34
Bidang-Bidang Prioritas Kesejahteraan Rakyat .....	35
PNPM Mandiri.....	36
Kredit Usaha Rakyat (KUR) .....	38
Anggaran Pembangunan Daerah .....	41





## DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2008 – 2010
- Tabel 2. Distribusi Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama, Tahun 2008 – 2010 (Jiwa)
- Tabel 3. Kontribusi Masing-masing Sektor Terhadap PDRB dan Penyerapan Tenaga Kerja, Tahun 2008-2010 (Persen)
- Tabel 4. Indikator Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009-2010
- Tabel 5. Indikator Ketenagakerjaan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009 dan 2010
- Tabel 6. Indikator Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009
- Tabel 7. Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009
- Tabel 8. Indikator Pendidikan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009
- Tabel 9. Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2008 - 2009
- Tabel 10. Komponen Indeks Komposit Ketahanan Pangan, Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009
- Tabel 11. Prioritas Intervensi Menurut Kabupaten Kota
- Tabel 12. Komposisi BLM PNPM Mandiri Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2011



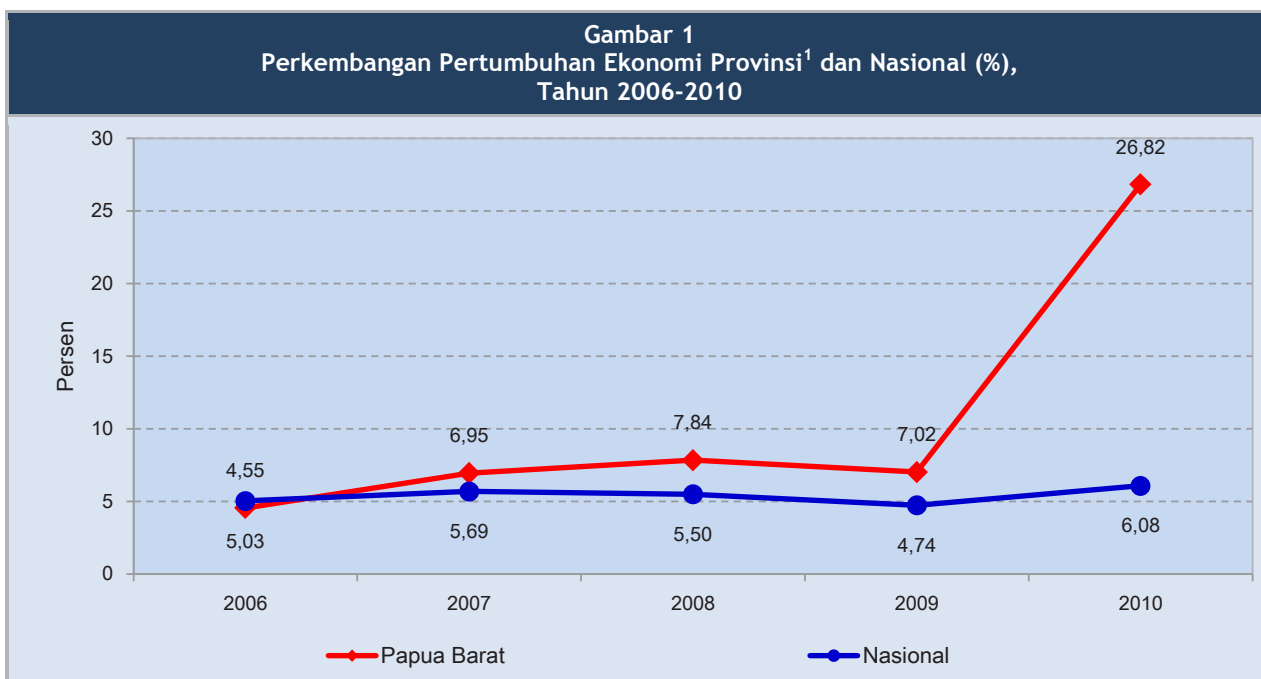
## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi dan Nasional (%), Tahun 2006-2010
- Gambar 2. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Provinsi (%), Tahun 2010
- Gambar 3. Rata-rata Upah/Gaji/Pendapatan Buruh/Karyawan/Pegawai Sebulan Menurut Provinsi, Tahun 2010
- Gambar 4. Perkembangan Inflasi Tahunan (Year-on-Year) Provinsi Papua Barat (%), Tahun 2010-2011
- Gambar 5. Inflasi Tahunan (Year-on-Year) Menurut 66 Kota Besar di Masing-masing Provinsi (%), (Bulan Juli 2011)
- Gambar 6. Perkembangan Nilai Tukar Petani (Year-on-Year) Provinsi Papua Barat, Tahun 2008-2011
- Gambar 7. Nilai Tukar Petani Menurut Provinsi (%), Bulan Juli 2011
- Gambar 8. Tingkat Kemiskinan Menurut Provinsi (%), Tahun 2010
- Gambar 9. Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota (%), Tahun 2010
- Gambar 10. Tingkat Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2010 dan Alokasi BLM PNPM Mandiri Tahun 2011 Menurut Kabupaten Kota
- Gambar 11. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Provinsi (%), Tahun 2010
- Gambar 12. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota (%), Tahun 2010
- Gambar 13. Persentase Balita Kekurangan Gizi Menurut Provinsi, Tahun 2010
- Gambar 14. Persentase Balita Kekurangan Gizi Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2007
- Gambar 15. Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup Menurut Provinsi (Jiwa), Tahun 2009
- Gambar 16. Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa), Tahun 2009
- Gambar 17. Persentase Kelahiran Ditolong oleh Tenaga Medis Menurut Provinsi, Tahun 2009
- Gambar 18. Persentase Kelahiran Ditolong oleh Tenaga Medis Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009
- Gambar 19. Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) Tahun 2009
- Gambar 20. Angka Putus Sekolah Penduduk Usia 7-15 Tahun Menurut Provinsi (%), Tahun 2009
- Gambar 21. Angka Putus Sekolah Penduduk Usia 7-15 Tahun Menurut Kabupaten/Kota (%), Tahun 2009
- Gambar 22. Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Air Bersih Menurut Provinsi (%), Tahun 2009
- Gambar 23. Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Air Bersih Menurut Kabupaten/Kota (%), Tahun 2009
- Gambar 24. Proporsi Rumah Tangga Tanpa Akses Sanitasi Menurut Provinsi (%), Tahun 2009
- Gambar 25. Proporsi Rumah Tangga Tanpa Akses Sanitasi Menurut Kabupaten/Kota (%), Tahun 2009

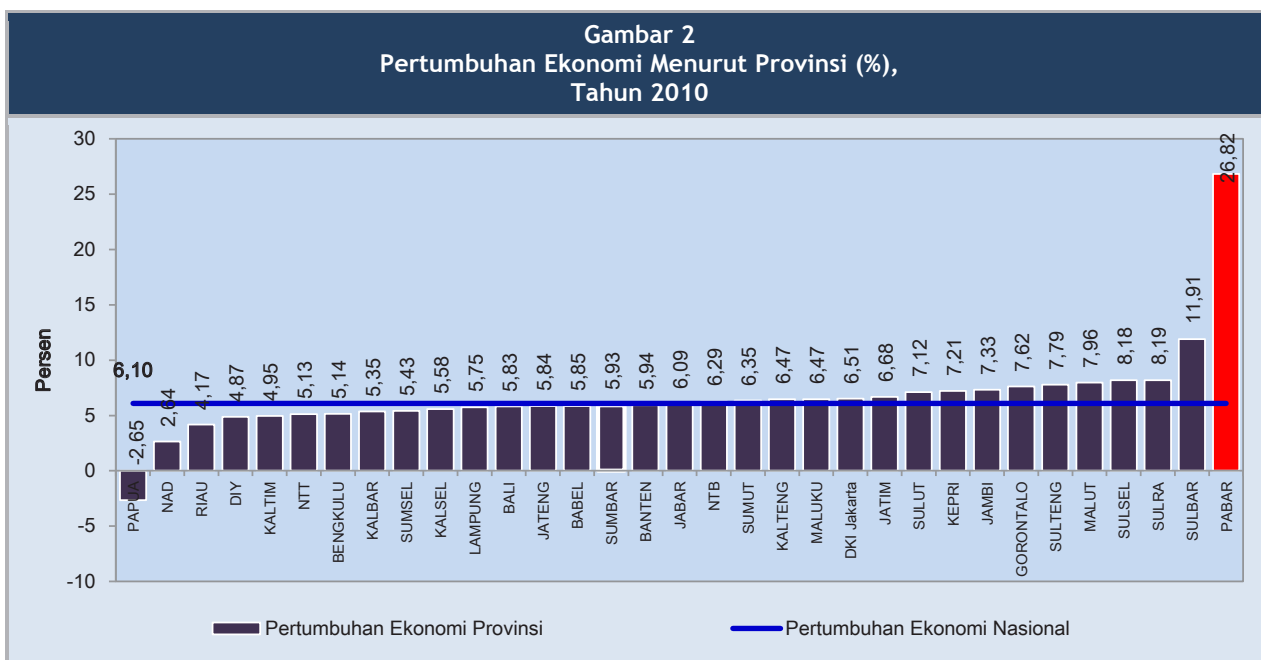
- Gambar 26. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Provinsi, Tahun 2009
- Gambar 27. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009
- Gambar 28. Konsumsi Normatif terhadap Produksi Bersih Sereal per Kapita Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009
- Gambar 29. Peta Kerentanan Terhadap Kerawanan Pangan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009
- Gambar 30. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Penurunan Angka Putus Sekolah Penduduk Usia 7-15 Tahun
- Gambar 31. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Peningkatan Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD/MI)
- Gambar 32. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Peningkatan Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan Menengah Pertama
- Gambar 33. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Penurunan Angka Kematian Bayi
- Gambar 34. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Penurunan Prevalensi Balita Kekurangan Gizi
- Gambar 35. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Meningkatkan Akses Terhadap Air Bersih
- Gambar 36. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Meningkatkan Akses Terhadap Sanitasi
- Gambar 37. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Meningkatkan Akses Terhadap Listrik
- Gambar 38. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Meningkatkan Kesempatan Kerja
- Gambar 39. Komposisi BLM PNPM Mandiri Provinsi Papua Barat, Tahun 2011
- Gambar 40. Perkembangan Rencana, Realisasi Penyaluran Kredit dan Jumlah Debitur KUR di Provinsi Papua Barat, 2010 - 2011
- Gambar 41. Perkembangan Rencana, Realisasi Penyaluran Kredit dan Jumlah Debitur KUR Nasional, 2010 - 2011
- Gambar 42. Jumlah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang Terserap Menurut Provinsi (Per 31 Juli 2011)
- Gambar 43. Jumlah Kredit Terserap Per-Debitur Menurut Provinsi (Per 31 Juli 2011)
- Gambar 44. Jumlah Kredit Terserap Per-Debitur Menurut Bank Penyalur (Juta Rupiah) (Per 31 Juli 2011)
- Gambar 45. Komposisi Kredit yang Terserap Menurut Bank Penyalur Provinsi Papua Barat (Juta Rupiah) (Per 31 Juli 2011)
- Gambar 46. Komposisi Alokasi Belanja Daerah Menurut Fungsi, Provinsi Papua Barat (Juta Rupiah), Tahun 2010
- Gambar 47. Komposisi Alokasi Belanja Daerah Menurut Fungsi dan Kabupaten/Kota, Provinsi Papua Barat, Tahun 2010



# PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DAN PERTUMBUHAN EKONOMI



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

<sup>1</sup> Pertumbuhan ekonomi tahun 2009 merupakan angka sementara dan tahun 2010 merupakan angka sangat sementara.

# PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Tabel 1.

Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2008 - 2010

LAPANGAN USAHA	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)			PDRB Atas Dasar Harga Konstan ADHK 2000 (Miliar Rupiah)			Pertumbuhan Ekonomi ADHK 2000 (Persen)		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Pertanian	3,223.45	4,199.94	4,664.46	1,801.67	1,896.82	2,014.32	5.42	5.28	6.19
Pertambangan Dan Penggalian	1,840.50	2,268.38	2,302.78	1,094.93	1,099.26	1,090.05	0.71	0.40	-0.84
Industri Pengolahan	2,864.19	4,253.88	7,985.22	885.42	1,004.83	2,507.29	8.82	13.49	149.52
Listrik, Gas & Air Bersih	67.29	88.16	97.56	29.45	31.77	34.09	9.47	7.88	7.30
Bangunan	1,150.83	1,678.23	2,034.29	572.82	654.54	718.47	15.02	14.27	9.77
Perdagangan, Hotel & Restoran	1,299.73	1,710.45	1,888.24	674.23	715.36	743.88	9.41	6.10	3.99
Pengangkutan & Komunikasi	919.64	1,248.42	1,437.07	490.02	551.87	612.2	11.29	12.62	10.93
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	300.81	410.53	489.99	149.17	152.39	169.18	26.1	2.16	11.02
Jasa - Jasa	974.04	1,356.15	1,627.75	684.49	741.71	796.16	9.58	8.36	7.34
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>12,640.48</b>	<b>17,214.14</b>	<b>22,527.36</b>	<b>6,382.20</b>	<b>6,848.55</b>	<b>8,685.64</b>	<b>7.55</b>	<b>7.31</b>	<b>26.82</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

Tabel 2.

Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama, Tahun 2008-2010 (Jiwa)

LAPANGAN USAHA	2008	2009	2009	2010	2010
	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
Pertanian	173,567	151,645	172,719	152,442	171,060
Pertambangan Dan Penggalian	9,080	6,206	9,231	5,858	6,757
Industri Pengolahan	10,595	12,307	11,404	10,864	12,300
Listrik, Gas & Air Bersih	308	218	751	738	587
Bangunan	12,456	18,740	14,554	18,297	16,032
Perdagangan, Hotel & Restoran	28,650	34,100	31,705	41,226	37,852
Pengangkutan & Komunikasi	16,941	17,734	14,718	14,354	15,046
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	2,480	3,966	1,609	2,864	2,843
Jasa - Jasa	41,145	65,818	48,484	70,057	54,070
<b>Jumlah</b>	<b>295,222</b>	<b>310,734</b>	<b>305,175</b>	<b>316,700</b>	<b>316,547</b>

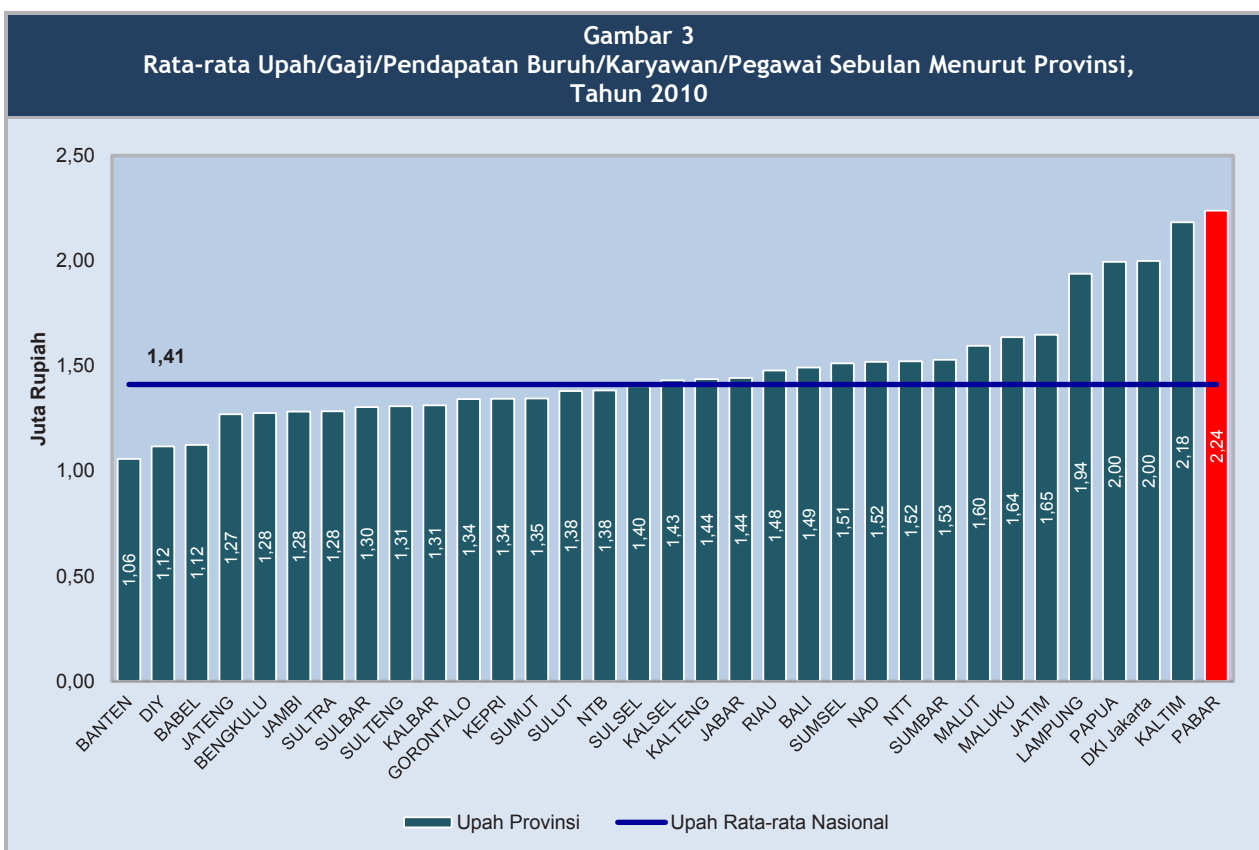
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

# PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Tabel 3.  
Kontribusi Masing-masing Sektor Terhadap PDRB dan Penyerapan Tenaga Kerja, Tahun 2008-2010 (Persen)

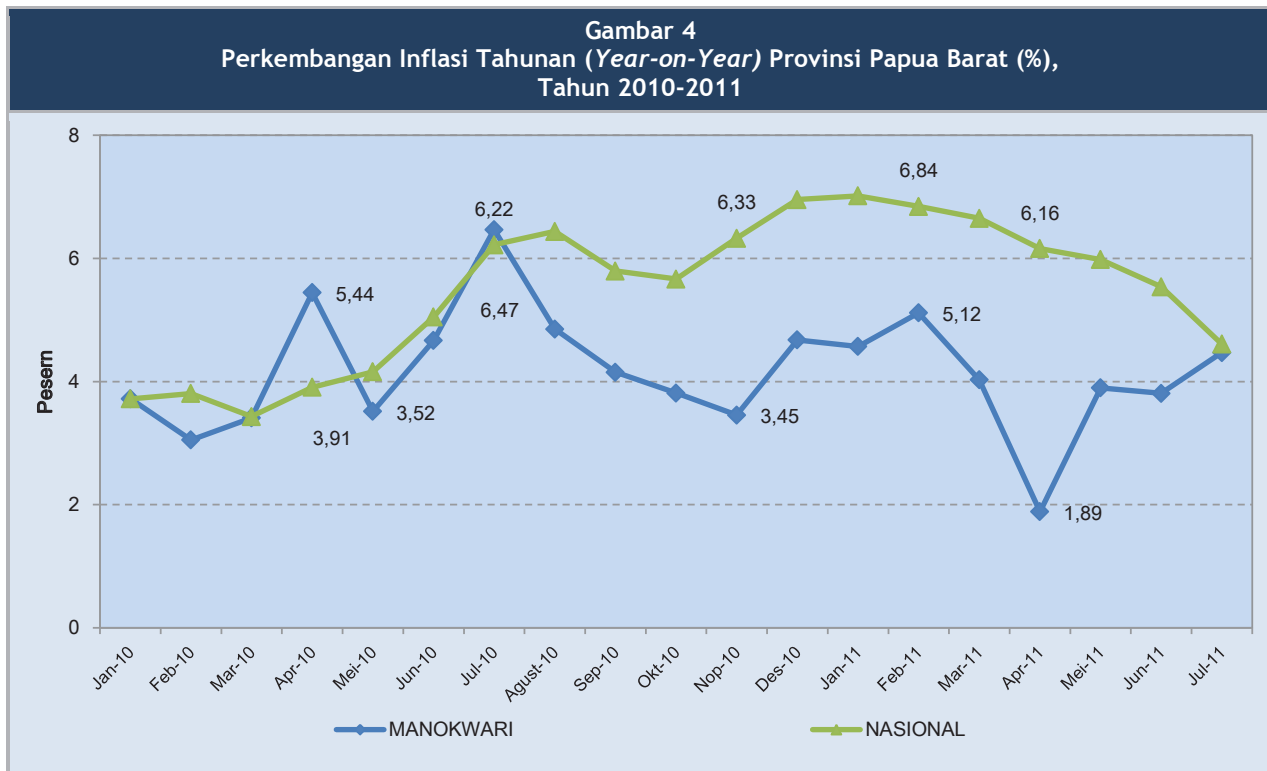
LAPANGAN USAHA	Distribusi PDRB (ADHK 2000)			Distribusi Tenaga Kerja		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Pertanian	28.23	27.70	23.19	58.79	56.60	54.04
Pertambangan Dan Penggalian	17.16	16.05	12.55	3.08	3.02	2.13
Industri Pengolahan	13.87	14.67	28.87	3.59	3.74	3.89
Listrik, Gas & Air Bersih	0.46	0.46	0.39	0.10	0.25	0.19
Bangunan	8.98	9.56	8.27	4.22	4.77	5.06
Perdagangan, Hotel & Restoran	10.56	10.45	8.56	9.70	10.39	11.96
Pengangkutan & Komunikasi	7.68	8.06	7.05	5.74	4.82	4.75
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	2.34	2.23	1.95	0.84	0.53	0.90
Jasa - Jasa	10.72	10.83	9.17	13.94	15.89	17.08

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

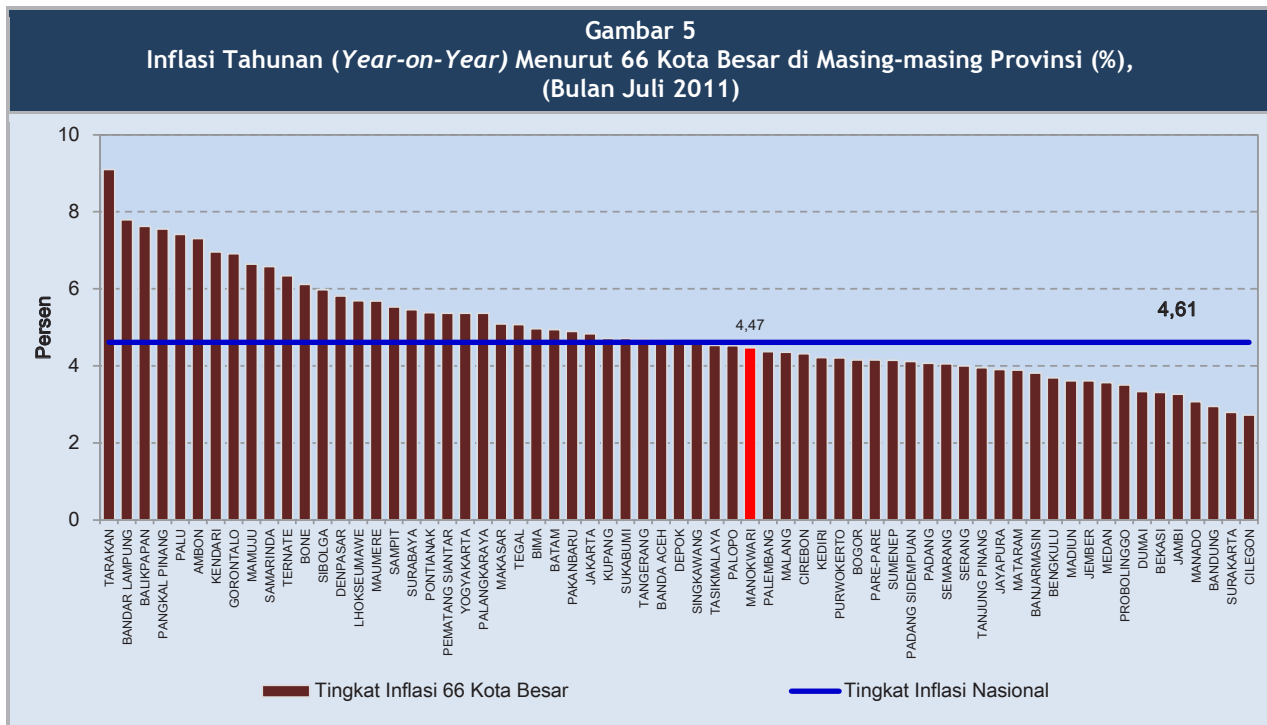


Sumber: Keadaan Pekerja di Indonesia, BPS 2011

# INFLASI



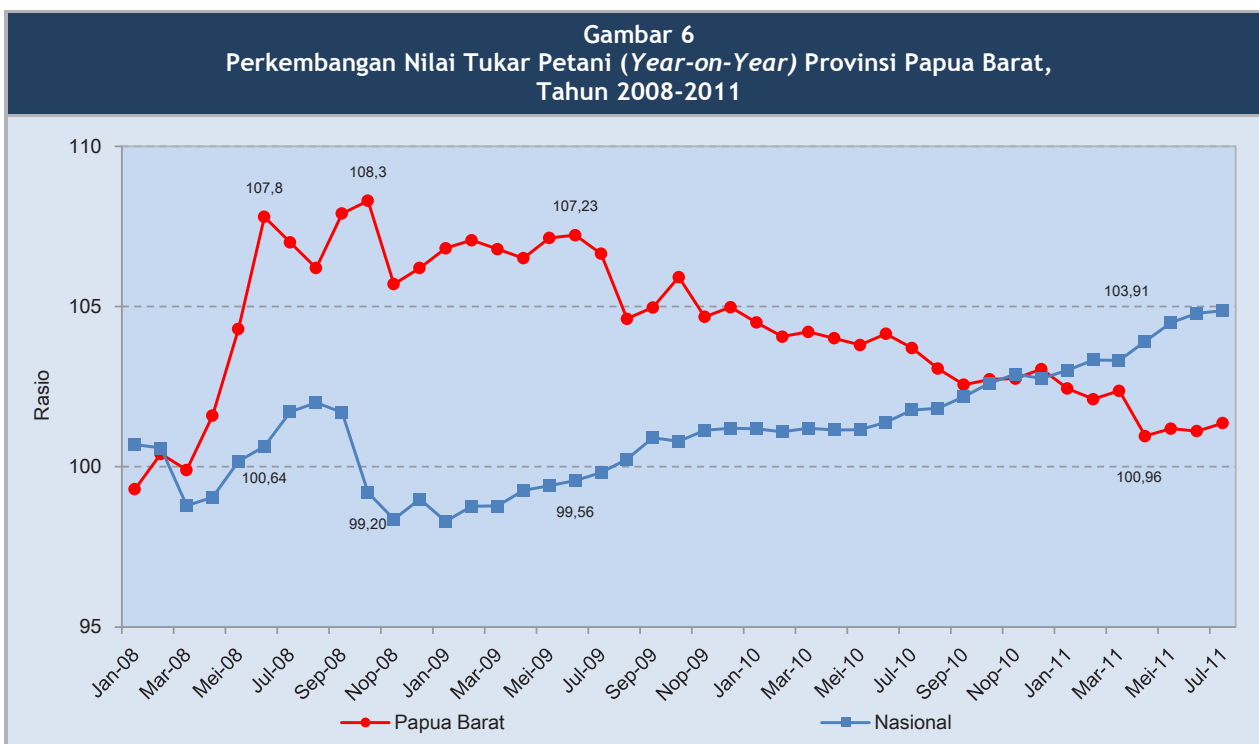
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011



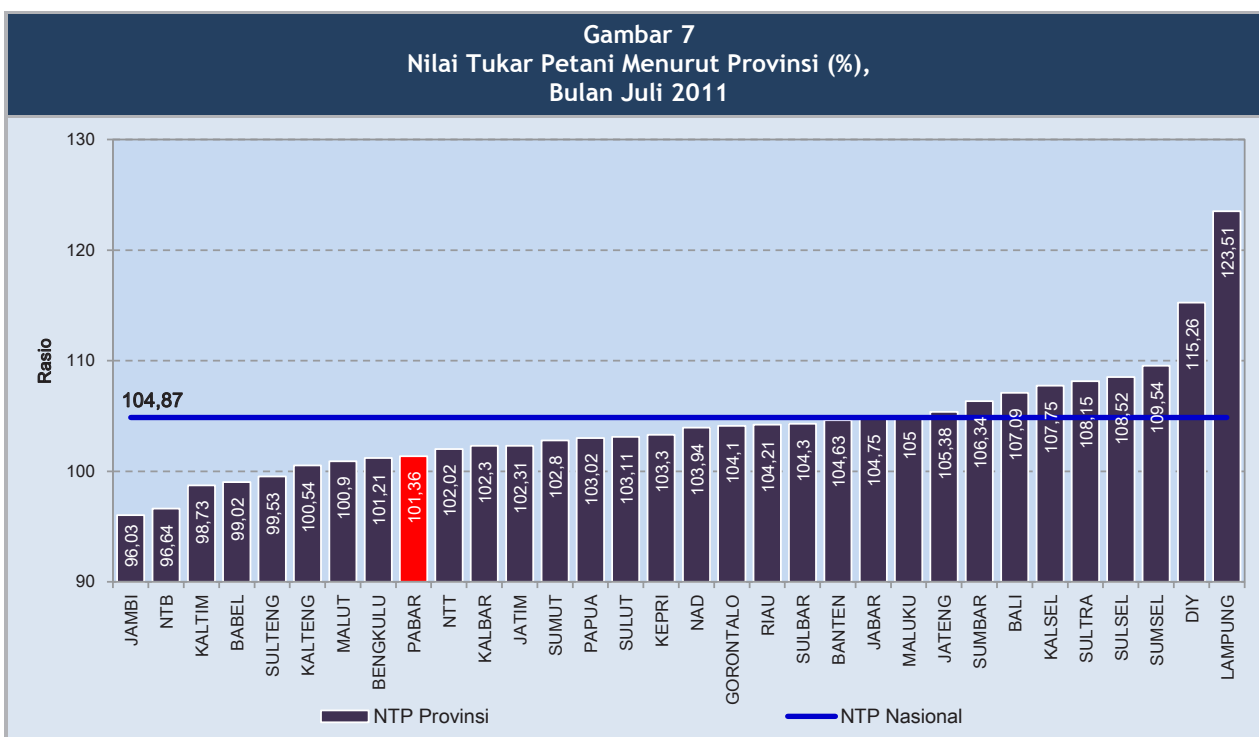
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011



# NILAI TUKAR PETANI

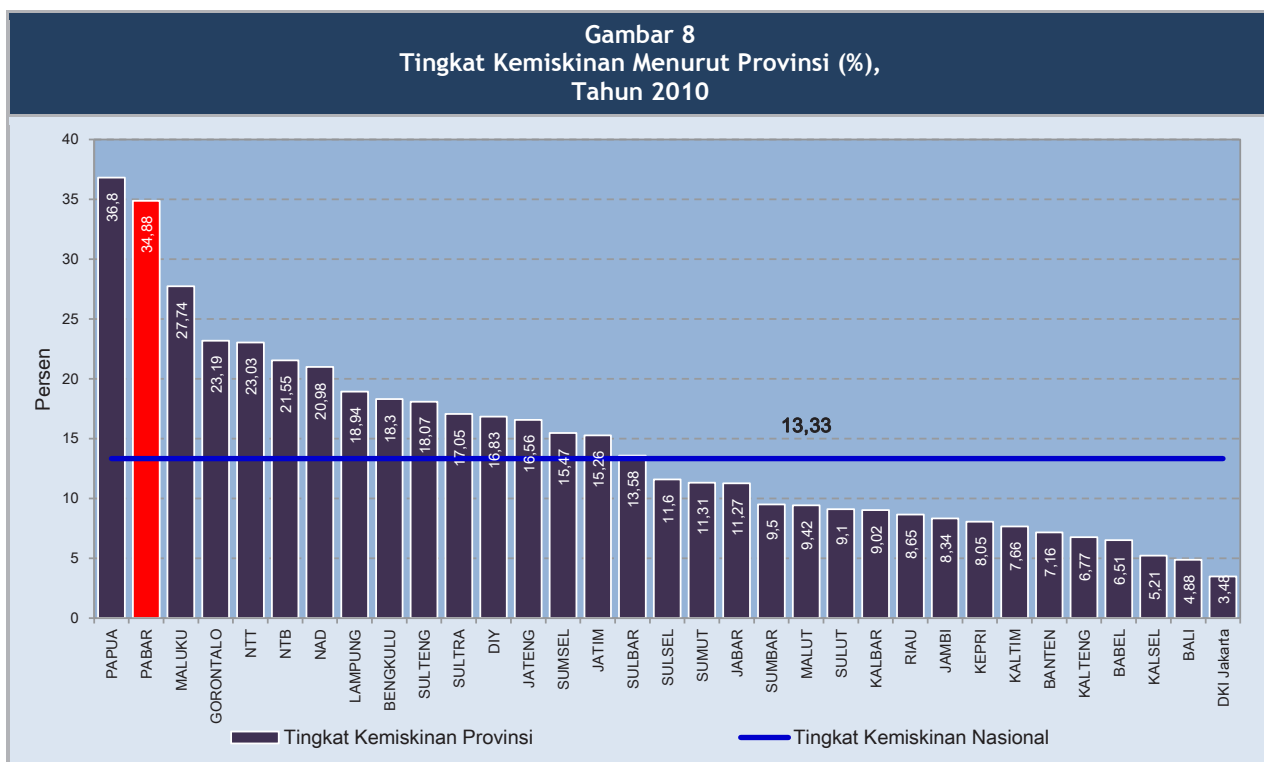


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

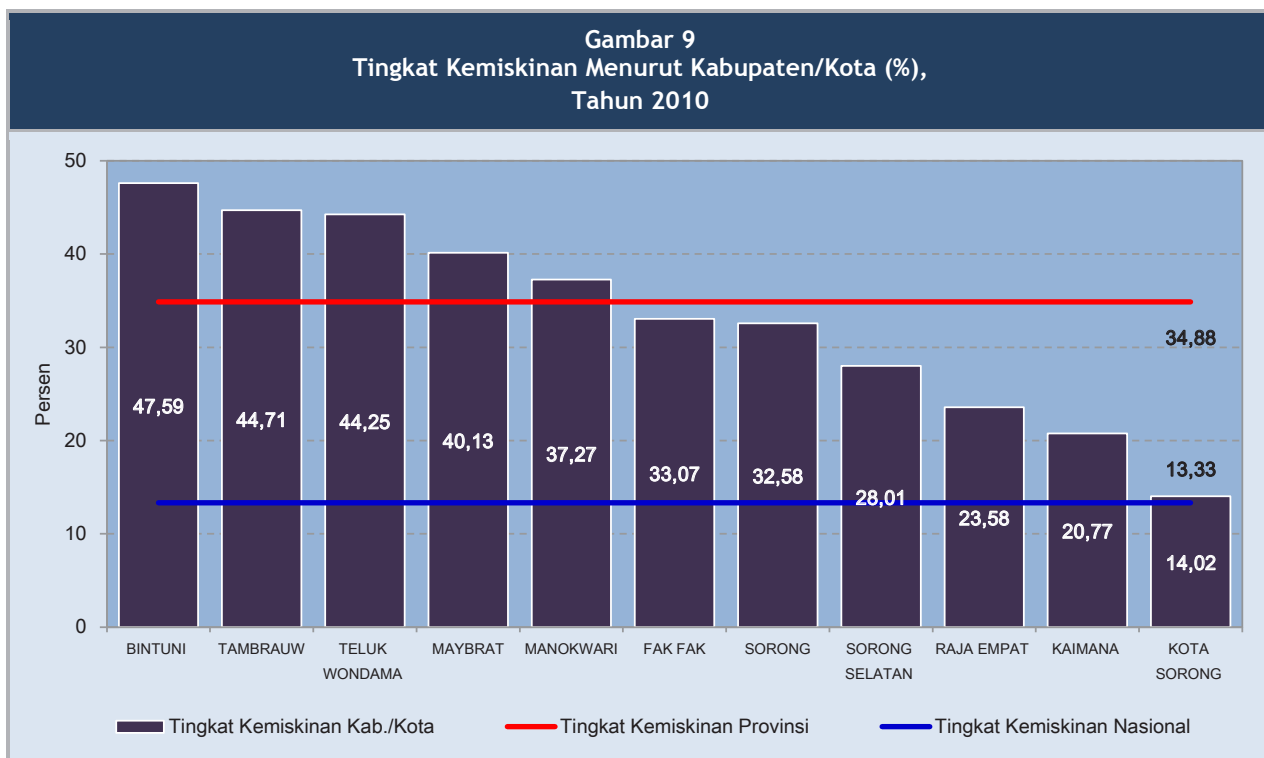


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

# TINGKAT KEMISKINAN



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

## INDIKATOR KEMISKINAN

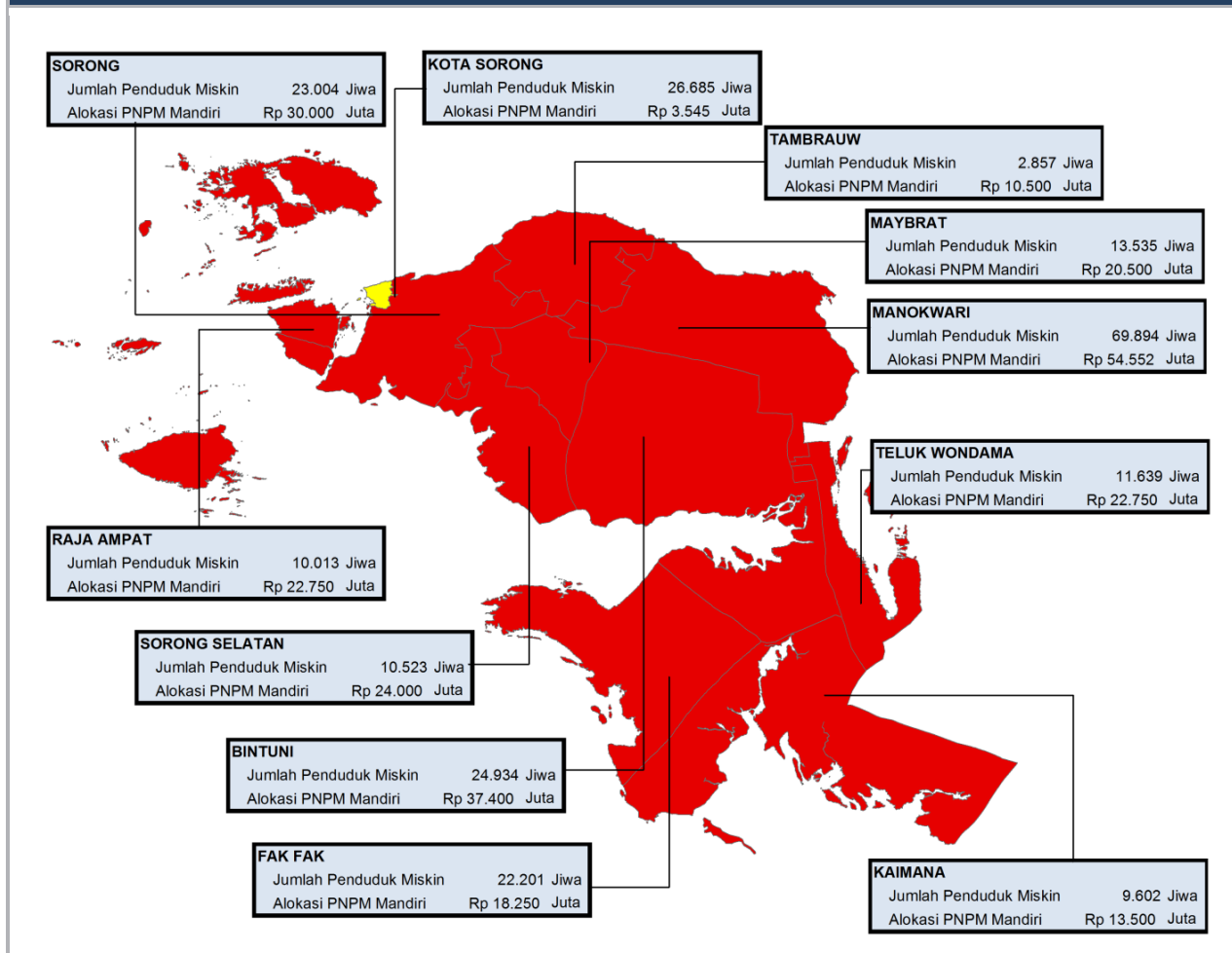
Tabel 4.  
Indikator Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009-2010

Daerah	Garis Kemiskinan (Rp/Bulan)		Presentase Penduduk Miskin (%)		Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010
FAK FAK	289 107	320 919	35,29	33,07	23 402	22 201
KAIMANA	226 850	251 812	23,51	20,77	9 799	9 602
TELUK WONDAMA	296 732	329 383	48,47	44,25	11 121	11 639
BINTUNI	350 817	389 419	51,91	47,59	28 212	24 934
MANOKWARI	341 271	378 823	40,80	37,27	70 242	69 894
SORONG SELATAN	209 315	227 968	26,76	28,01	16 306	10 523
SORONG	223 625	243 554	34,45	32,58	33 438	23 004
RAJA EMPAT	221 776	241 540	23,71	23,58	9 659	10 013
TAMBRAUW		245 060		44,71		2 857
MAYBRAT		248 702		40,13		13 535
KOTA SORONG	402 953	438 863	15,12	14,02	25 397	26 685
PAPUA BARAT	277 416	294 727	35,71	34,88	227 576	224 887
INDONESIA	200 262	211 726	14,15	13,33	32.530.000	31.023.390

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011 (Berdasarkan hasil Susenas Kor Juli 2010)

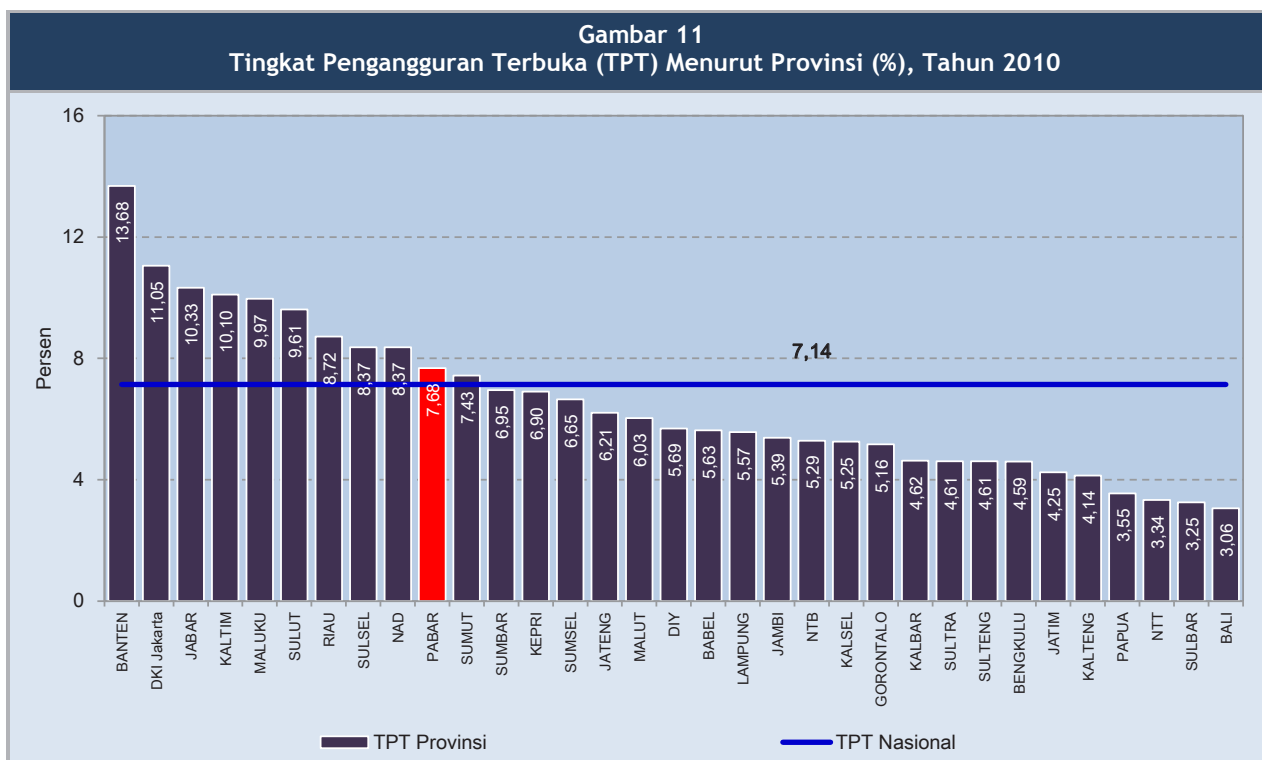
# PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

**Gambar 10**  
**Tingkat Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2010,**  
**Alokasi BLM PNPM Mandiri Tahun 2011 Menurut Kabupaten Kota**

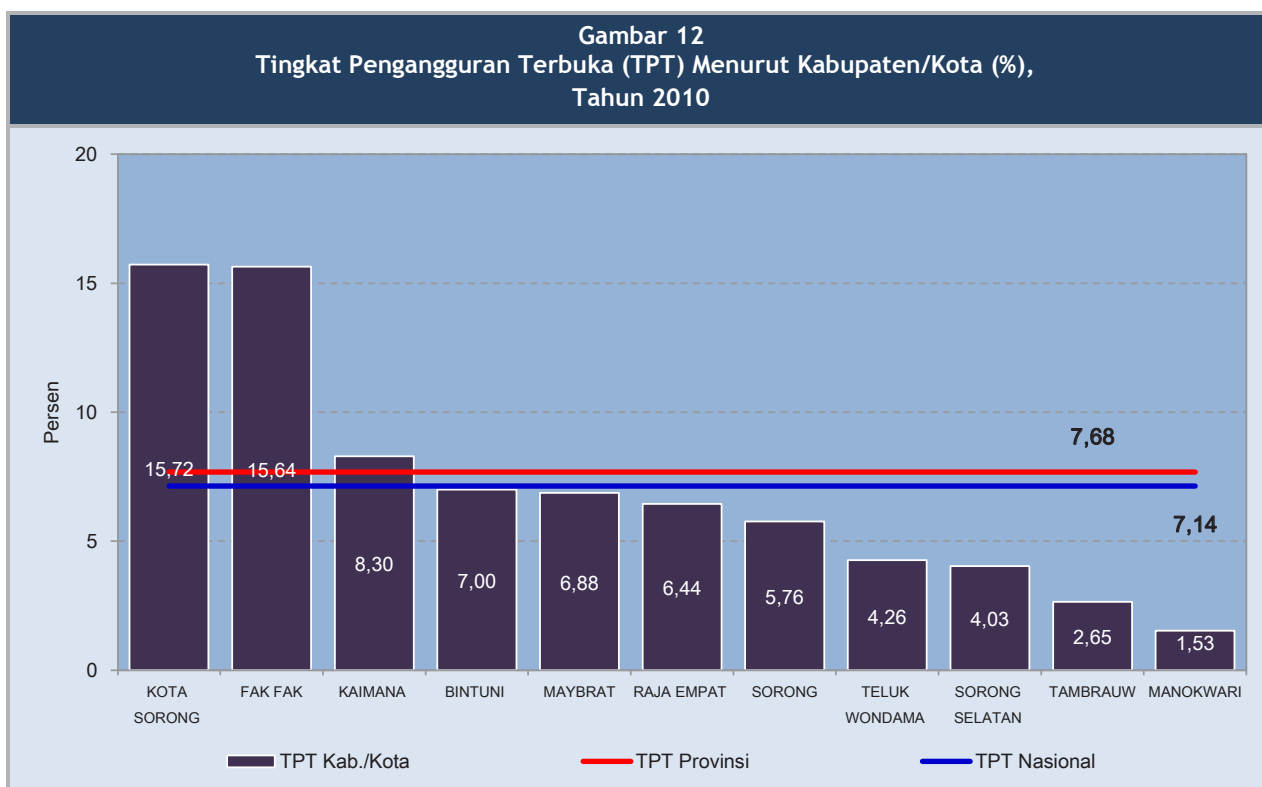


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011  
 Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2011

# TINGKAT PENGANGGURAN DAN KETENAGAKERJAAN



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011 (Berdasarkan Hasil Sakernas Agustus 2010)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011 (Berdasarkan Hasil Sakernas Agustus 2010)

## TINGKAT PENGANGGURAN DAN KETENAGAKERJAAN

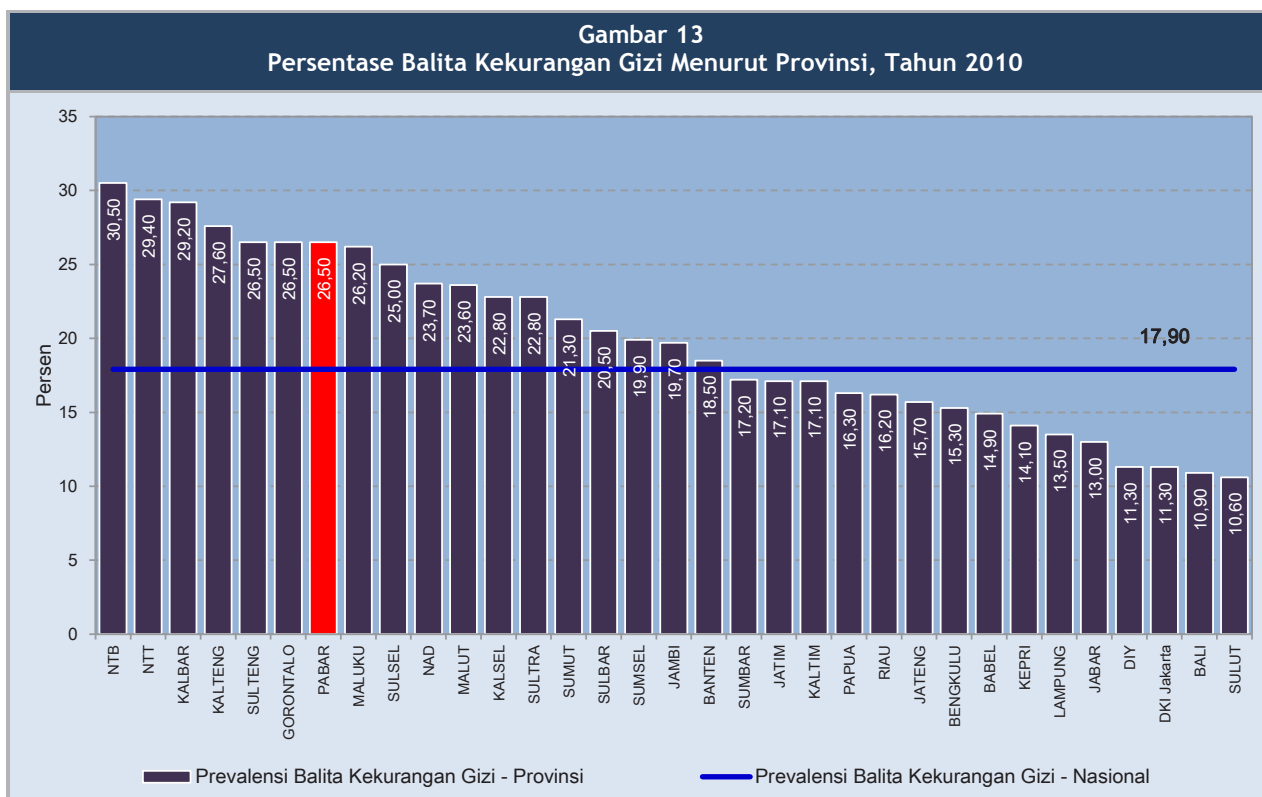
Tabel 5.  
Indikator Ketenagakerjaan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009 dan 2010

Daerah	Angka Partisipasi Angkatan Kerja		Pekerja yang Bekerja Selama Kurang dari 14 Jam Seminggu		Pekerja yang Bekerja Selama Kurang dari 35 Jam Seminggu		Pekerja di Sektor Informal	
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
FAK FAK	55,78	54,00	1,18	7,06	39,71	36,85	57,78	54,93
KAIMANA	64,44	72,35	2,79	3,81	40,07	49,83	77,90	75,48
TELUK WONDAMA	62,86	76,50	1,85	6,06	43,57	32,34	71,76	71,05
BINTUNI	68,67	75,40	4,04	2,16	31,43	39,08	63,65	51,72
MANOKWARI	79,26	78,78	0,83	2,51	27,04	43,08	80,75	81,36
SORONG SELATAN	77,54	66,50	3,94	3,44	48,34	37,18	77,76	72,51
SORONG	66,84	70,21	2,28	2,80	22,39	22,01	68,58	64,42
RAJA EMPAT	64,77	62,29	1,32	2,61	42,87	43,47	84,99	69,45
TAMBRAUW		77,84		0,32		41,00		86,68
MAYBRAT		76,00		0,32		25,85		83,86
KOTA SORONG	62,44	62,07	2,21	1,43	14,01	12,91	35,37	27,23
PAPUA BARAT	68,52	69,29	2,02	2,69	29,18	32,90	67,18	63,06
NASIONAL	67,23	67,72	4,29	4,11	30,10	30,75	61,56	58,96

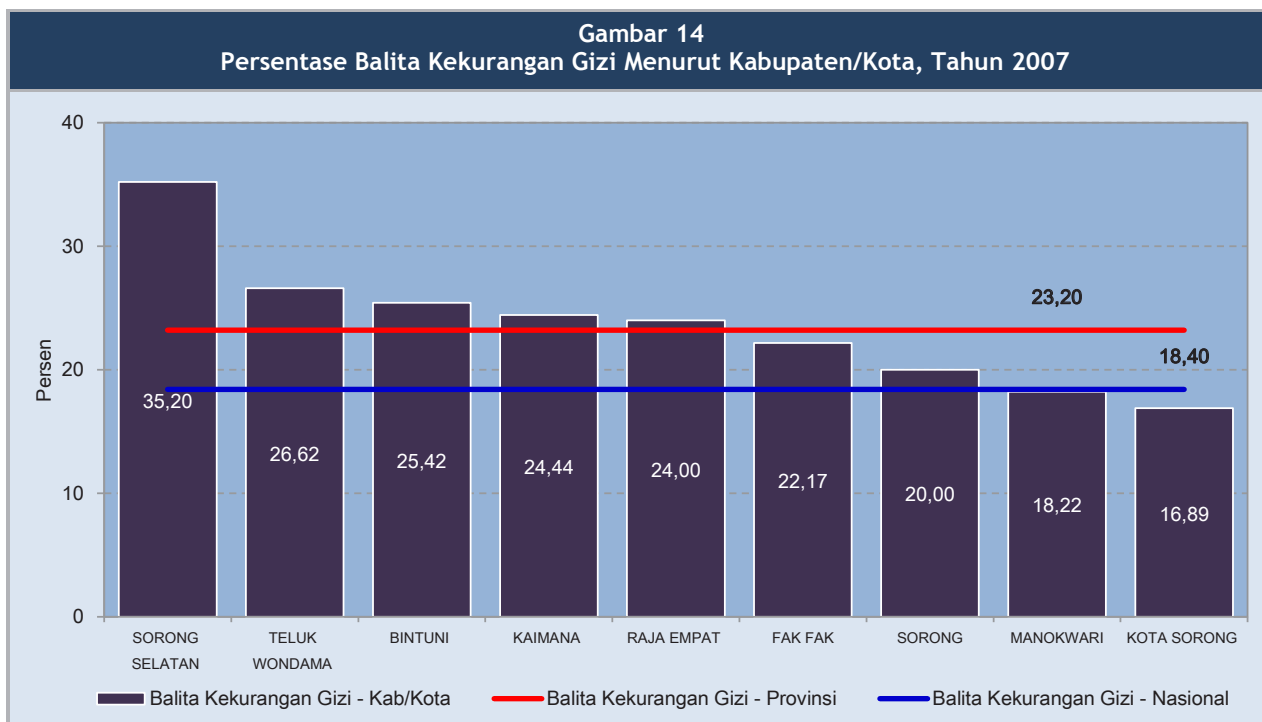
Keterangan: Daerah Pemekaran, Data Belum Tersedia.

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011 (Berdasarkan Hasil Sakernas Agustus 2010)

## BIDANG KESEHATAN

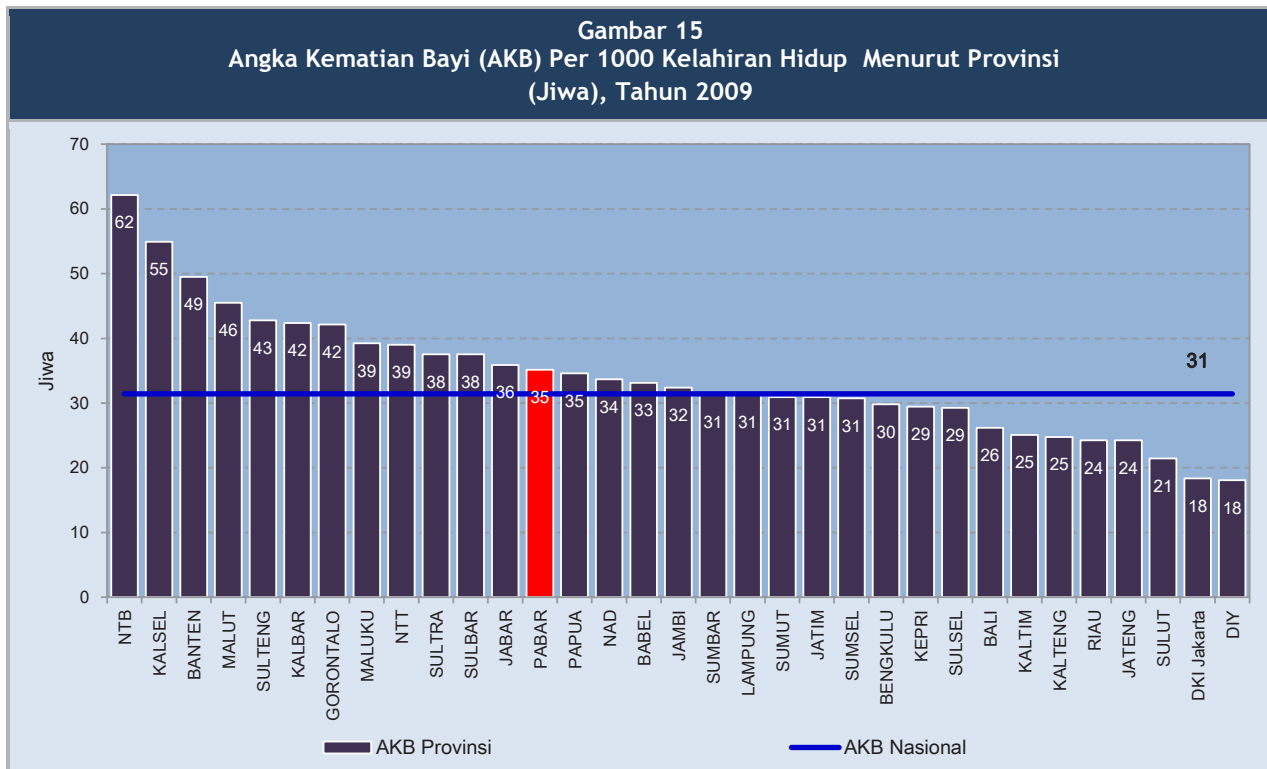


Sumber: Riset Kesehatan Dasar, Kementerian Kesehatan 2010

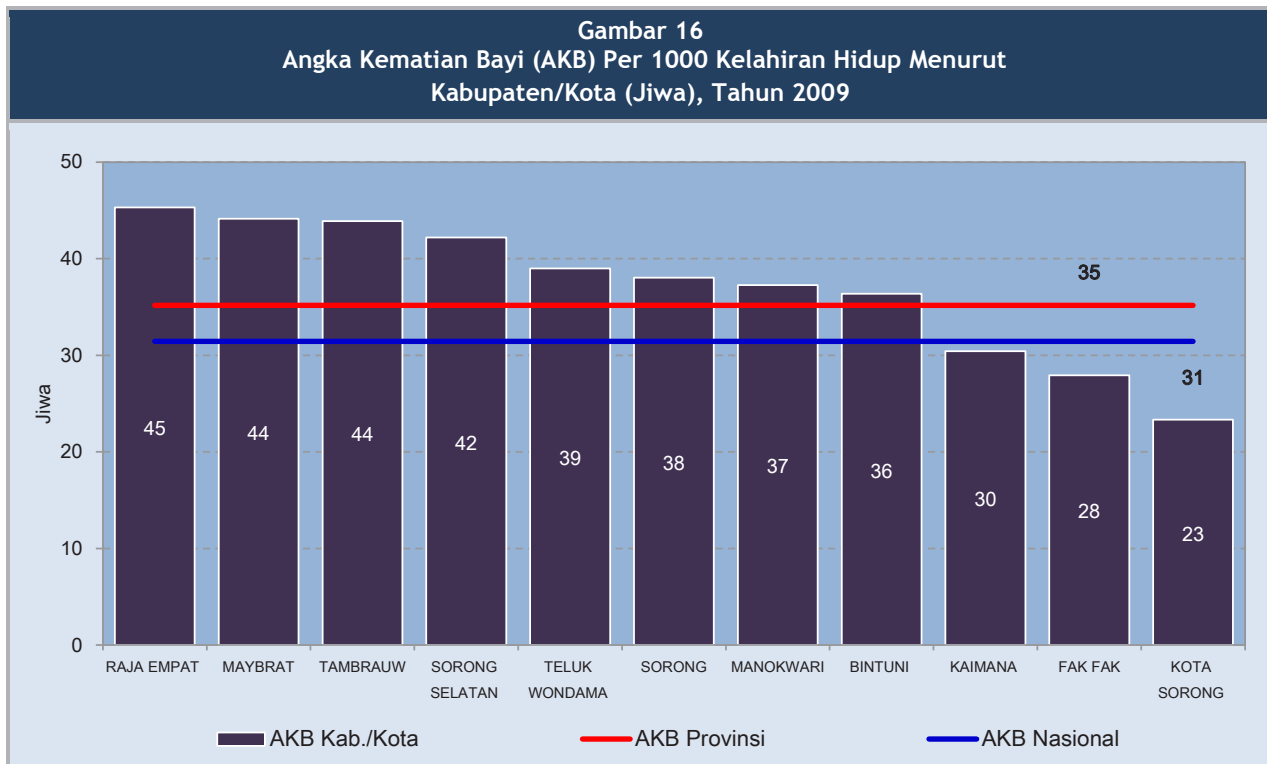


Sumber: Riset Kesehatan Dasar, Kementerian Kesehatan 2007

## BIDANG KESEHATAN



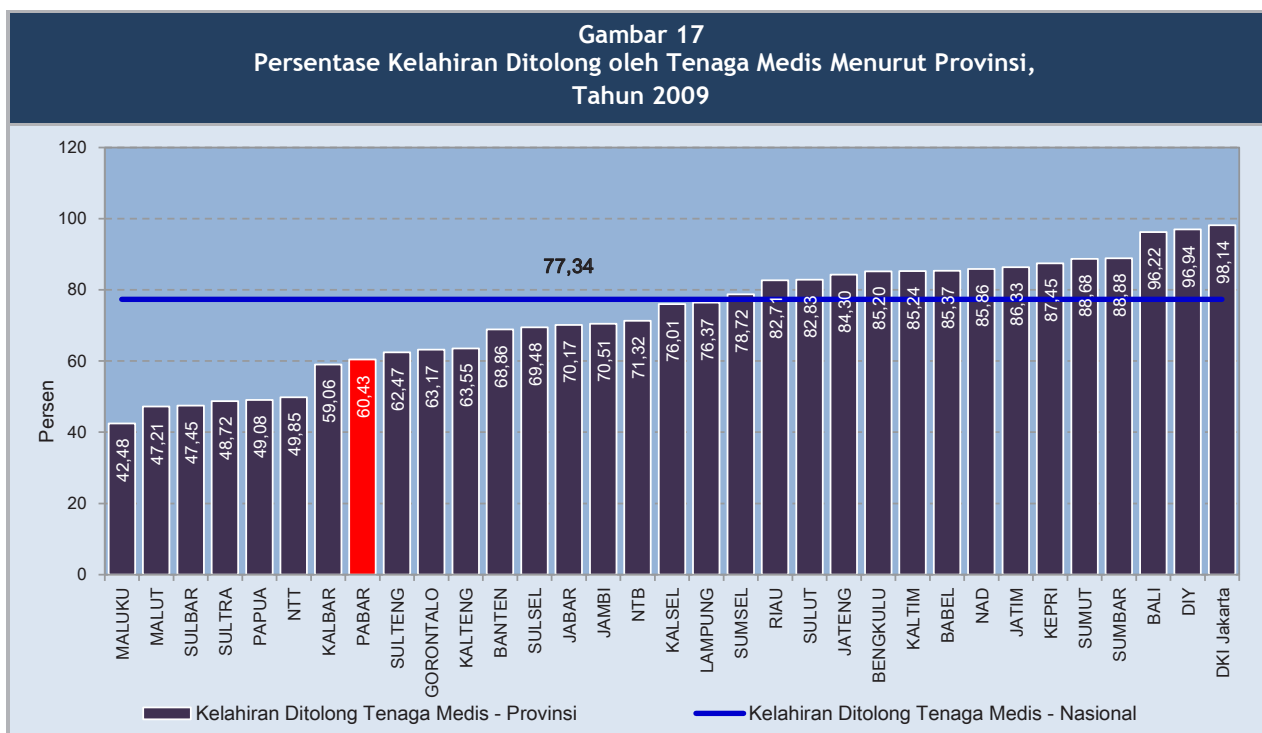
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010



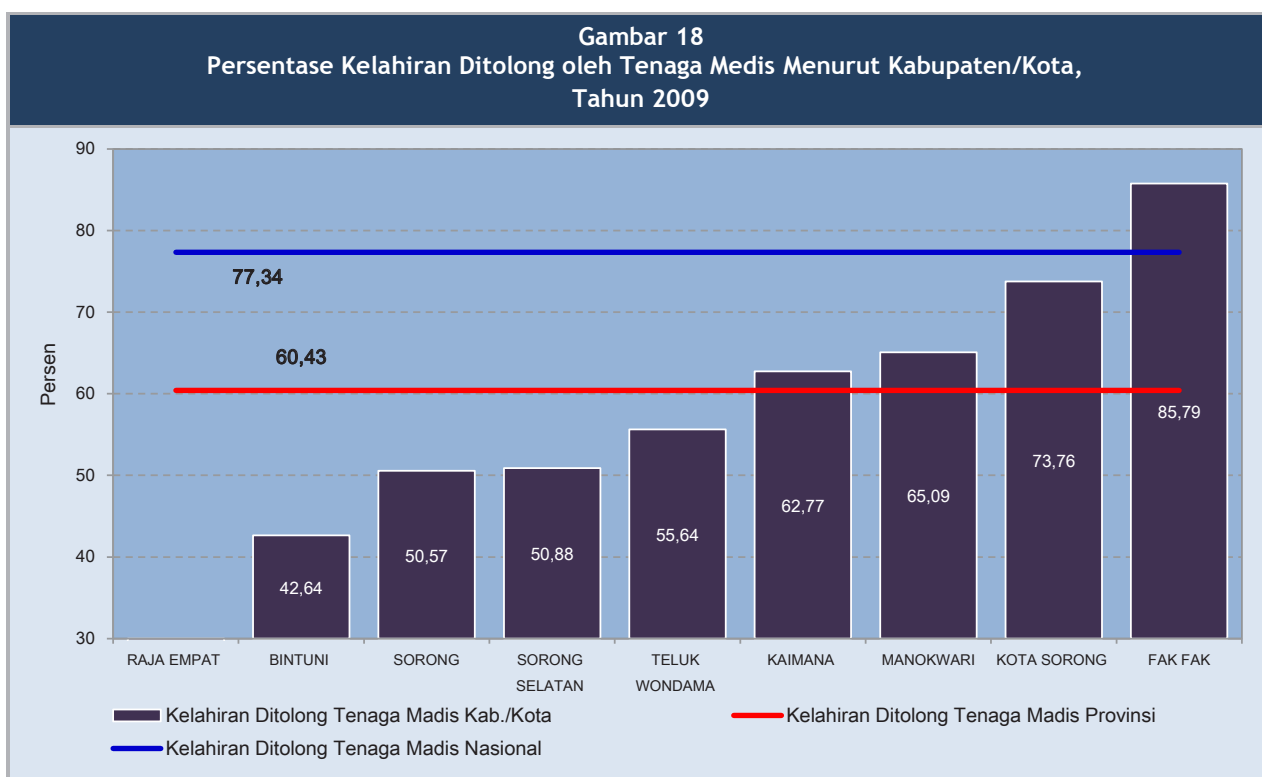
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010



## BIDANG KESEHATAN



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

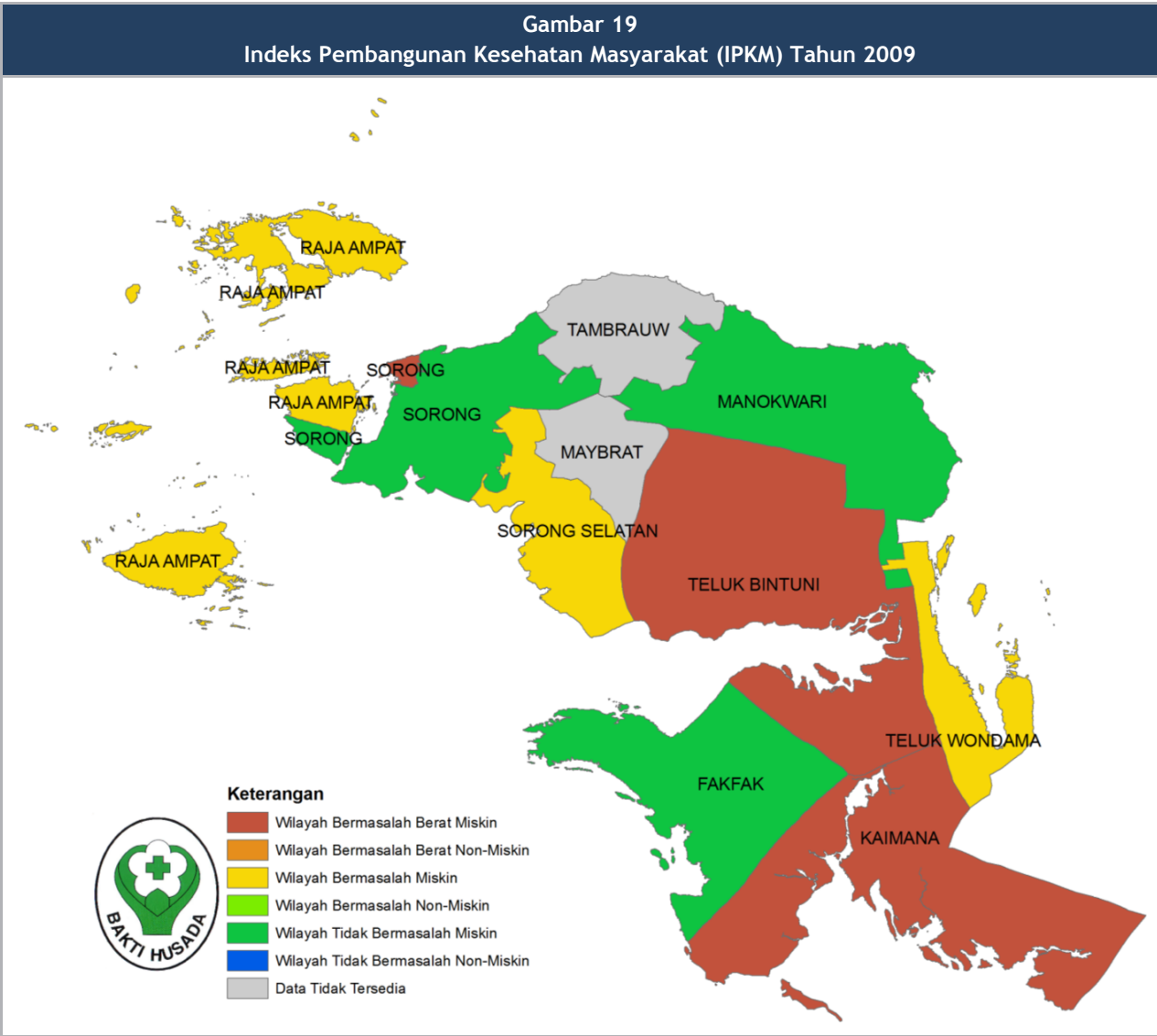
## BIDANG KESEHATAN

Tabel 6.  
Indikator Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009

Daerah	Penduduk dengan keluhan kesehatan	Angka Morbiditas	Rata-rata Lama Sakit	Penduduk yg Melakukan Pengobatan Sendiri
	(%)	(%)	(%)	(%)
FAK FAK	13,86	11,61	4,33	92,85
KAIMANA	17,64	10,03	3,75	64,81
TELUK WONDAMA	38,84	25,24	5,81	50,49
BINTUNI	45,71	20,61	3,57	39,26
MANOKWARI	40,89	30,74	4,33	68,78
SORONG SELATAN	27,60	18,60	3,43	73,07
SORONG	28,70	16,79	4,90	73,98
RAJA EMPAT	16,61	13,78	3,72	31,97
KOTA SORONG	27,62	16,10	5,07	62,85
PAPUA BARAT	30,18	19,62	4,42	64,15
INDONESIA	33,68	18,63	5,51	68,41

Keterangan: Daerah Pemekaran, Data Belum Tersedia.  
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

# INDEKS PEMBANGUNAN KESEHATAN MASYARAKAT



Sumber: Kementerian Kesehatan, 2010

## INDEKS PEMBANGUNAN KESEHATAN MASYARAKAT

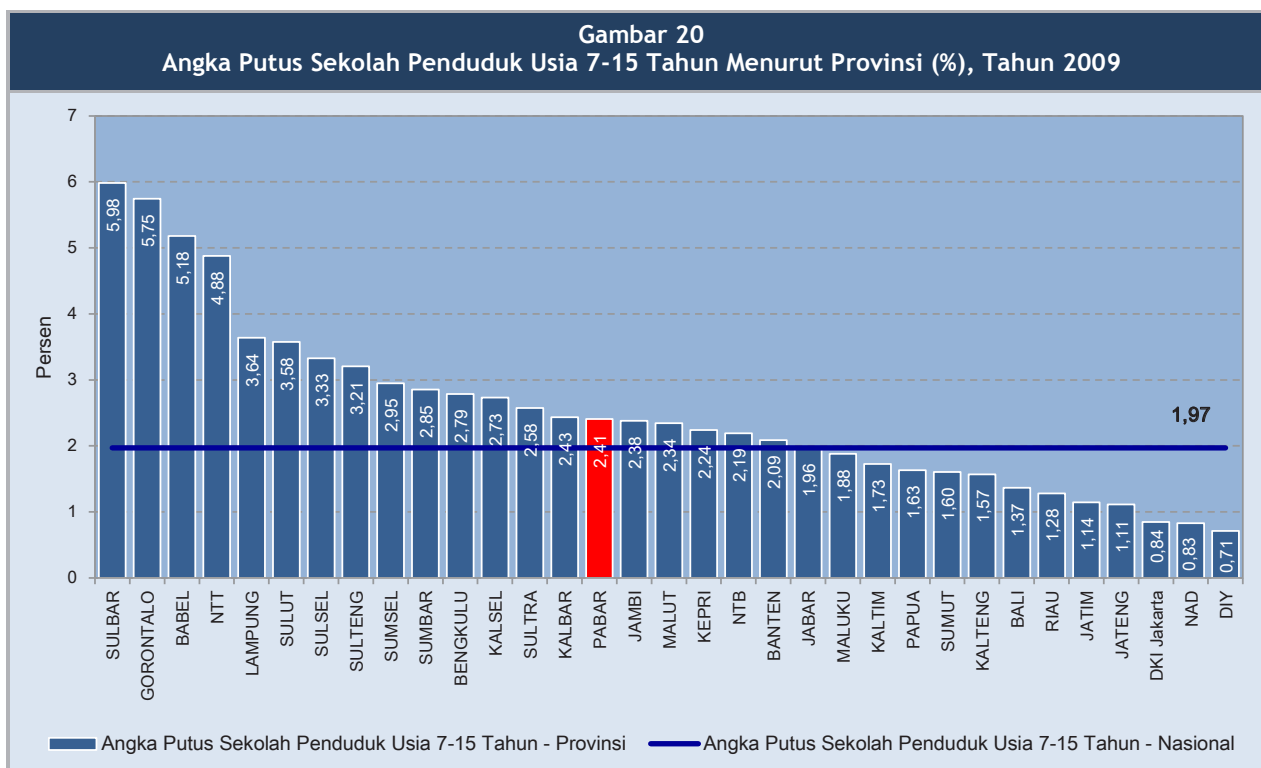
Tabel 7.  
Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)<sup>2</sup> Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009

Kabupaten/Kota	Kategori Wilayah	IPKM		Keterangan
		Rangking	Nilai	
KAIMANA	KaA	402	0,38	Kabupaten Bermasalah Berat Miskin
TELUK WONDAMA	KaA	408	0,37	Kabupaten Bermasalah Berat Miskin
KOTA SORONG	KoA	156	0,55	Kota Bermasalah Berat Miskin
TELUK BINTUNI	KaC	293	0,46	Kabupaten Bermasalah Miskin
SORONG SELATAN	KaC	358	0,43	Kabupaten Bermasalah Miskin
RAJA AMPAT	KaC	261	0,48	Kabupaten Bermasalah Miskin
MANOKWARI	KaE	255	0,48	Kabupaten Tidak Bermasalah Miskin
SORONG	KaE	222	0,51	Kabupaten Tidak Bermasalah Miskin
FAK-FAK	KaE	211	0,52	Kabupaten Tidak Bermasalah Miskin

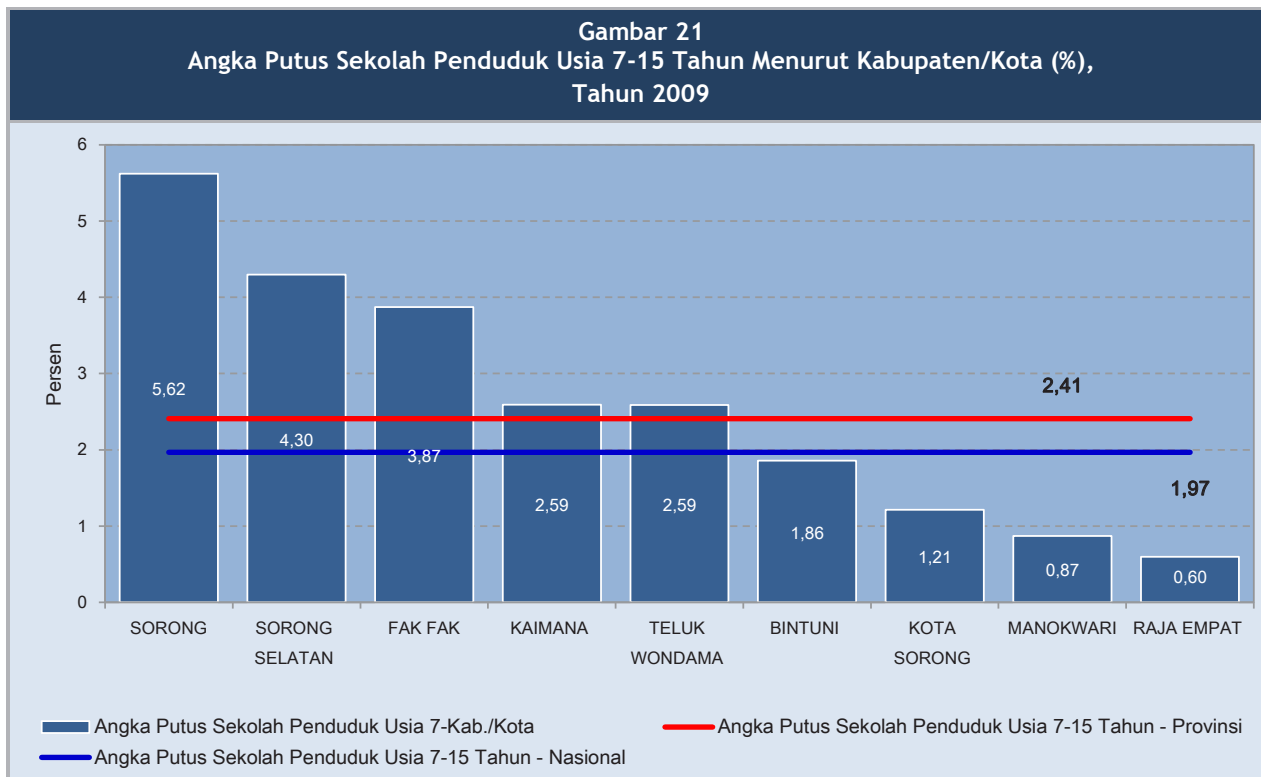
Sumber: Kementerian Kesehatan, 2010

<sup>2</sup> IPKM (Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat) adalah indikator komposit yang dirumuskan dari 24 indikator kesehatan dan dirumuskan dari data kesehatan berbasis komunitas yaitu: Risesdas (Riset Kesehatan Dasar); Susenas (Survei Ekonomi Nasional); dan Survei Podes (Potensi Desa). IPKM digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan pada bidang kesehatan dan mendukung efektivitas intervensi pada bidang kesehatan.

## BIDANG PENDIDIKAN



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

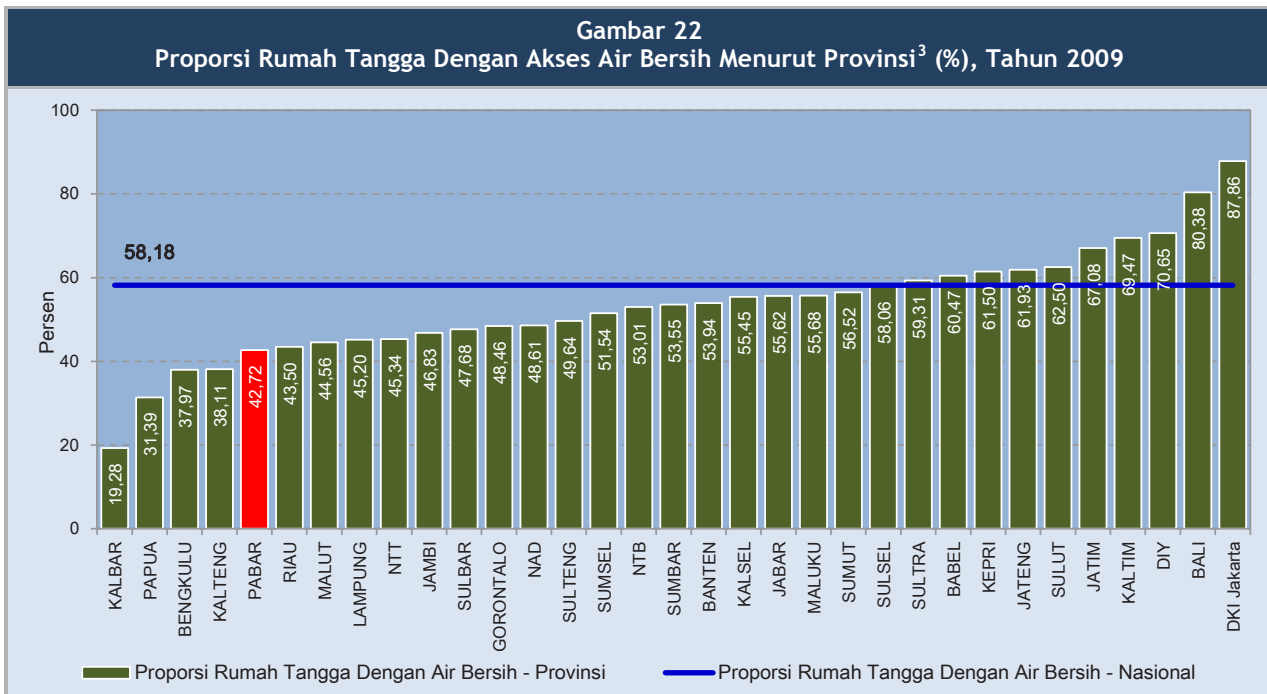
## BIDANG PENDIDIKAN

Tabel 8.  
Indikator Pendidikan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009

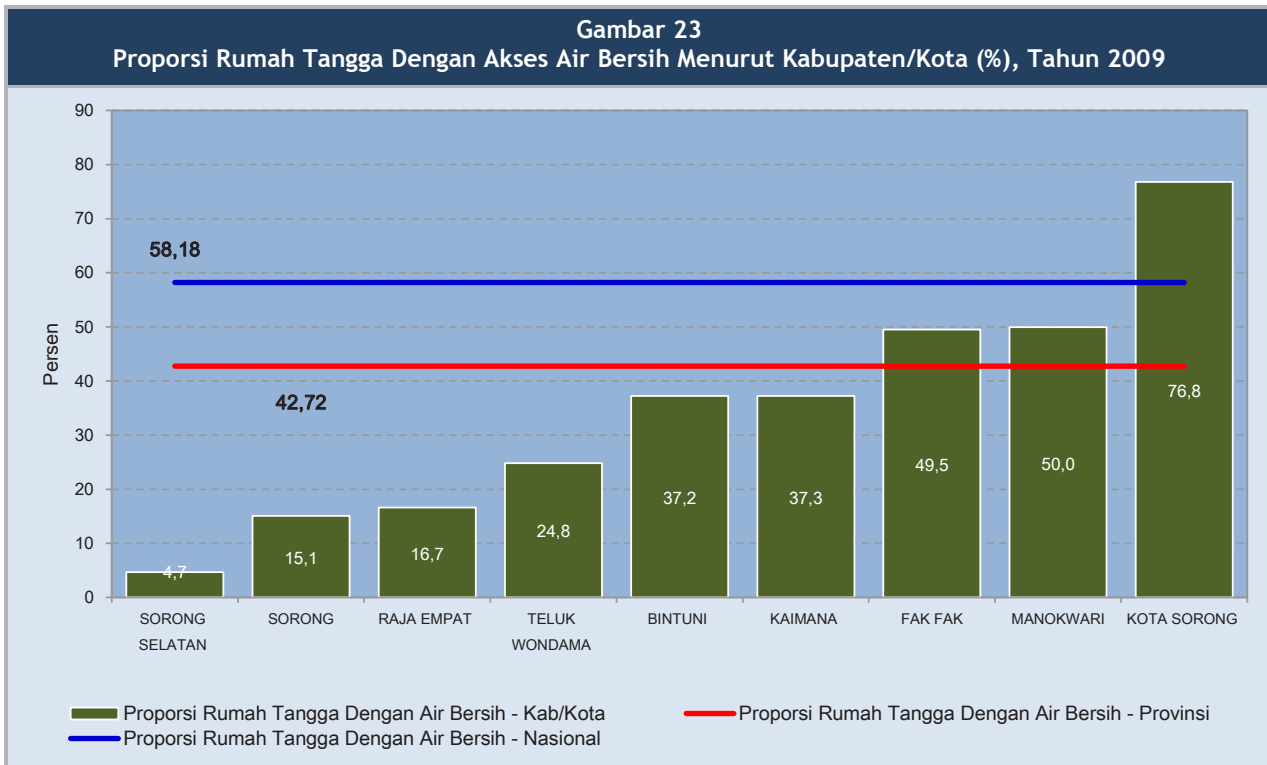
Daerah	Angka Partisipasi Pendidikan					
	Sekolah Dasar (SD/MI)		Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)		Sekolah Menengah Atas (SMA/MA/SMK)	
	APK	APM	APK	APM	APK	APM
FAK FAK	120,04	91,94	54,63	47,22	67,64	44,03
KAIMANA	118,07	96,71	46,11	31,05	54,80	33,67
TELUK WONDAMA	127,47	88,07	56,54	20,35	38,10	31,16
BINTUNI	116,41	94,73	76,48	49,33	31,76	28,83
MANOKWARI	113,71	88,40	80,05	55,16	78,68	56,74
SORONG SELATAN	114,19	90,78	48,88	22,22	30,90	27,27
SORONG	114,67	88,79	43,18	36,37	58,49	43,86
RAJA EMPAT	138,59	93,40	45,14	35,44	89,12	52,70
KOTA SORONG	117,17	93,10	87,26	73,85	58,76	38,82
PAPUA BARAT	117,50	91,25	66,29	49,03	62,04	43,55
INDONESIA	110,42	94,37	81,25	67,43	62,55	45,11

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

# AKSES TERHADAP AIR BERSIH



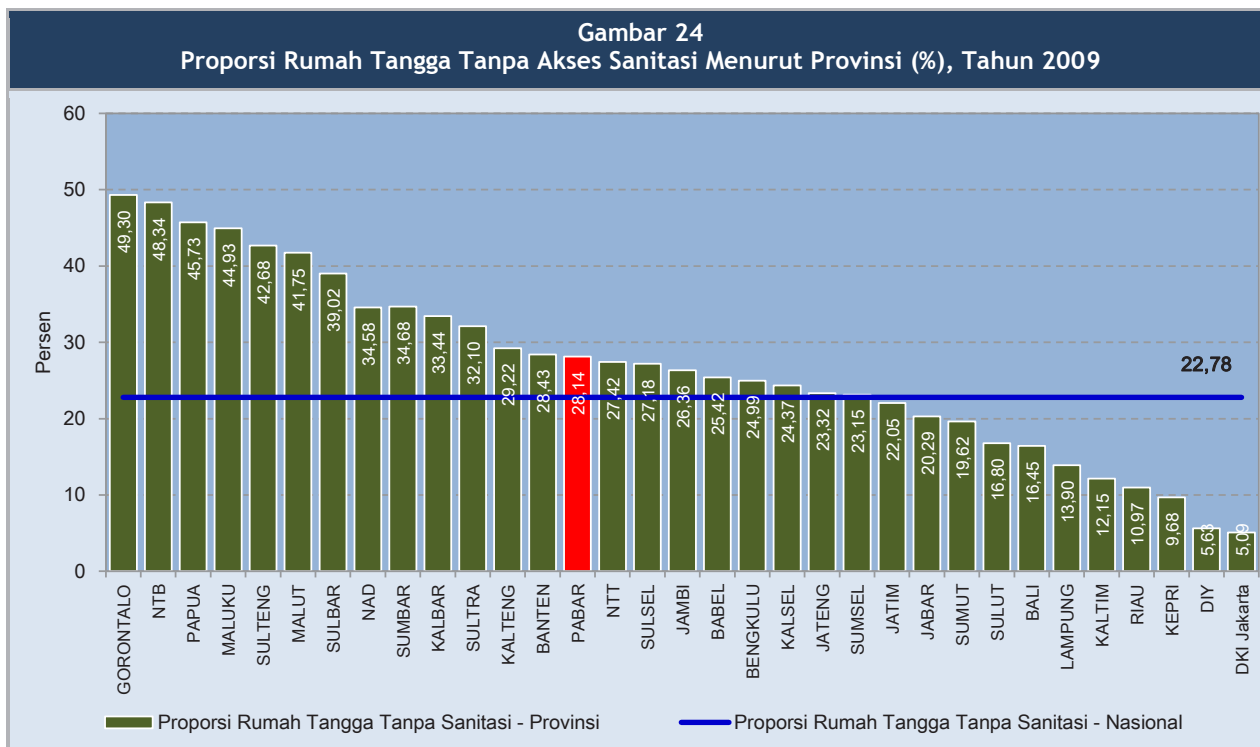
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010



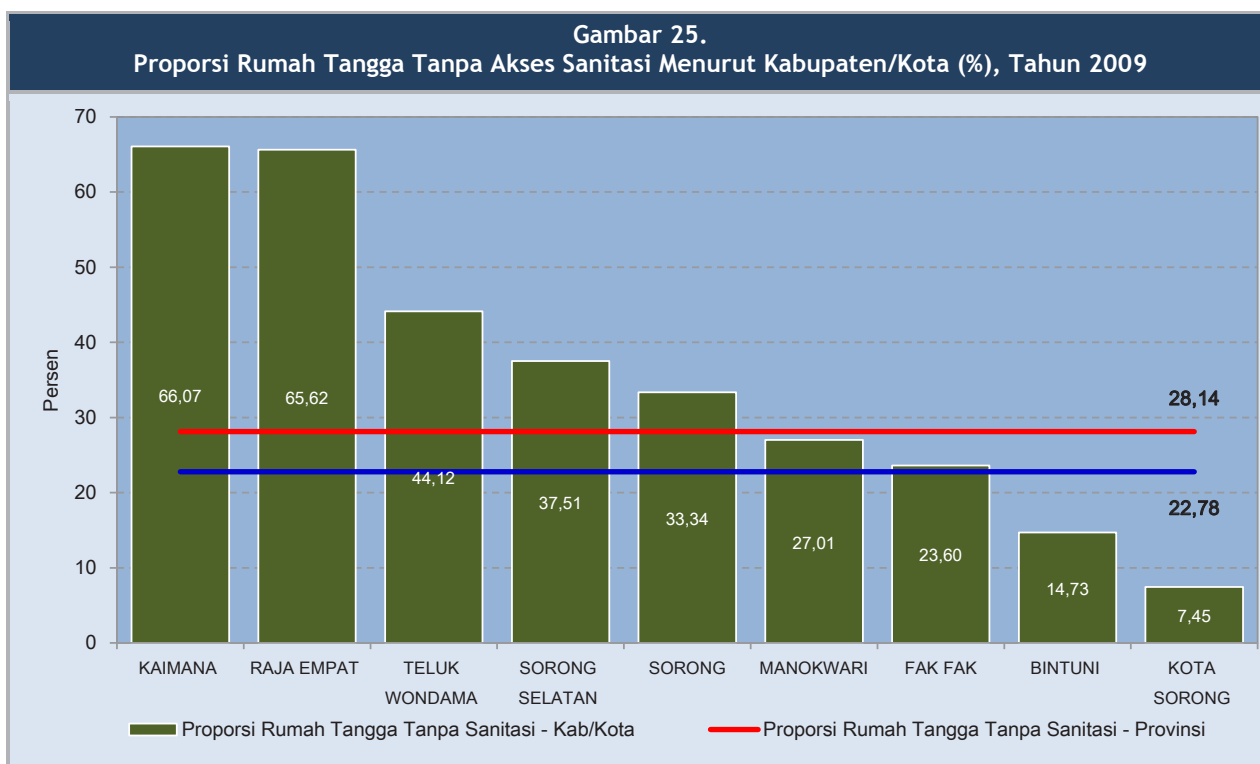
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

<sup>3</sup> Akses terhadap air bersih dengan kontrol jarak ke tempat penampungan kotoran/tinja terdekat

# AKSES TERHADAP SANITASI



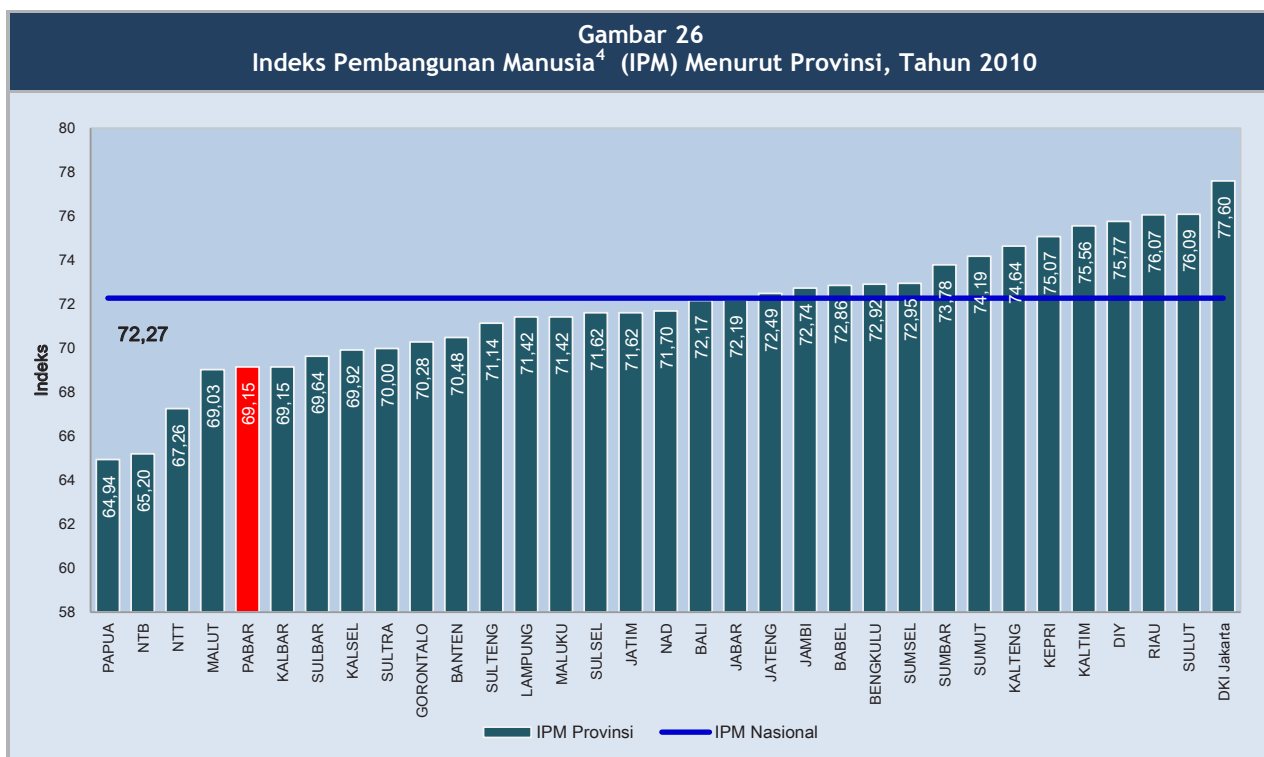
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010



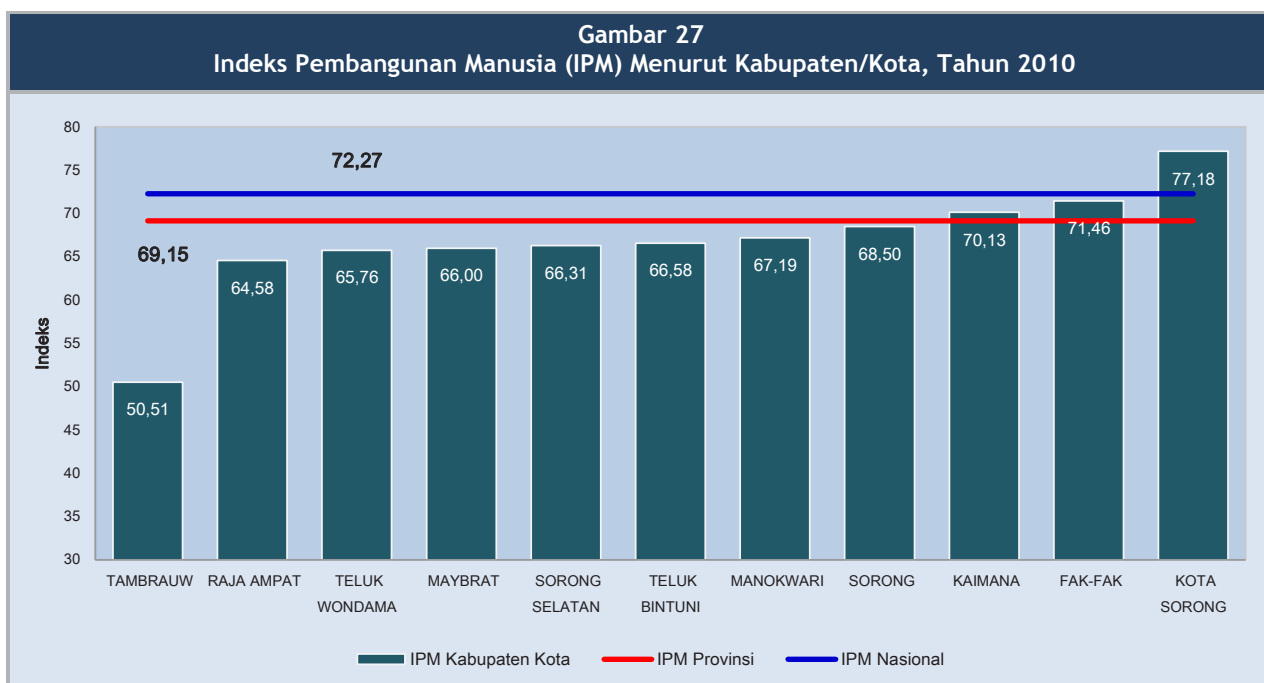
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010



# INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

<sup>4</sup> Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / Human Development Index (HDI) adalah pengukuran kesejahteraan dengan membandingkan antara harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup. Ukuran kesejahteraan tersebut diperkenalkan dan diterbitkan oleh PBB dalam Laporan Pembangunan Manusia (Human Development Report) sejak tahun 1990.

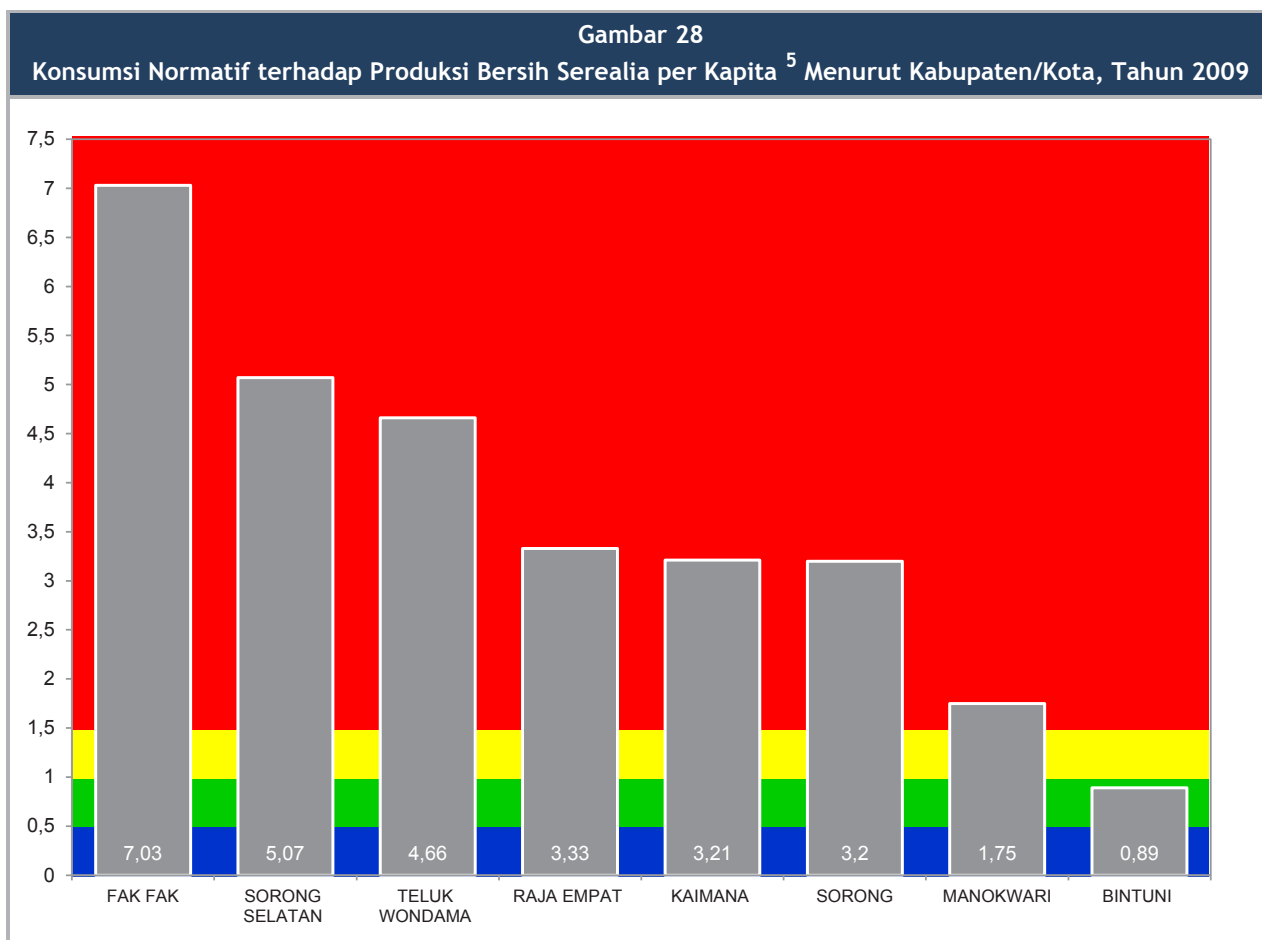
## KOMPONEN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Tabel 9.  
Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota,  
Tahun 2009 dan 2010

Provinsi	Angka Harapan Hidup		Angka Melek Huruf		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran Per Kapita		IPM	
	(Tahun)		(Persen)		(Tahun)		(Ribu Rp PPP)		2009	2010
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
FAK-FAK	70,16	70,52	97,18	97,46	9,09	9,27	585,63	589,06	70,80	71,46
KAIMANA	69,48	69,65	95,49	95,50	7,32	7,55	599,40	600,31	69,80	70,13
TELUK WONDAMA	67,25	67,51	83,13	84,05	6,44	6,61	600,79	601,00	65,27	65,76
TELUK BINTUNI	67,88	68,21	82,98	85,90	6,88	6,90	597,49	598,46	65,65	66,58
MANOKWARI	67,67	68,00	85,67	87,79	7,95	8,37	588,11	588,30	66,20	67,19
SORONG SELATAN	66,49	66,66	88,20	88,32	7,94	7,98	587,90	588,85	66,09	66,31
SORONG	67,49	67,85	91,40	91,69	8,04	8,06	597,45	598,18	68,16	68,50
RAJA AMPAT	65,75	66,17	92,77	93,62	7,26	7,35	560,49	560,70	64,08	64,58
TAMBRAUW	66,09	66,15	76,38	77,15	4,21	5,74	440,53	441,15	49,12	50,51
MAYBRAT	66,03	66,33	89,80	90,73	6,92	7,78	580,93	582,12	64,89	66,00
KOTA SORONG	71,53	71,95	99,12	99,13	10,54	10,59	634,63	635,48	76,84	77,18
PAPUA BARAT	68,20	68,51	92,34	93,19	8,01	8,21	595,28	596,08	68,58	69,15
INDONESIA	69,21	69,43	92,58	92,91	7,72	7,92	631,46	633,64	71,76	72,27

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

## KETAHANAN PANGAN



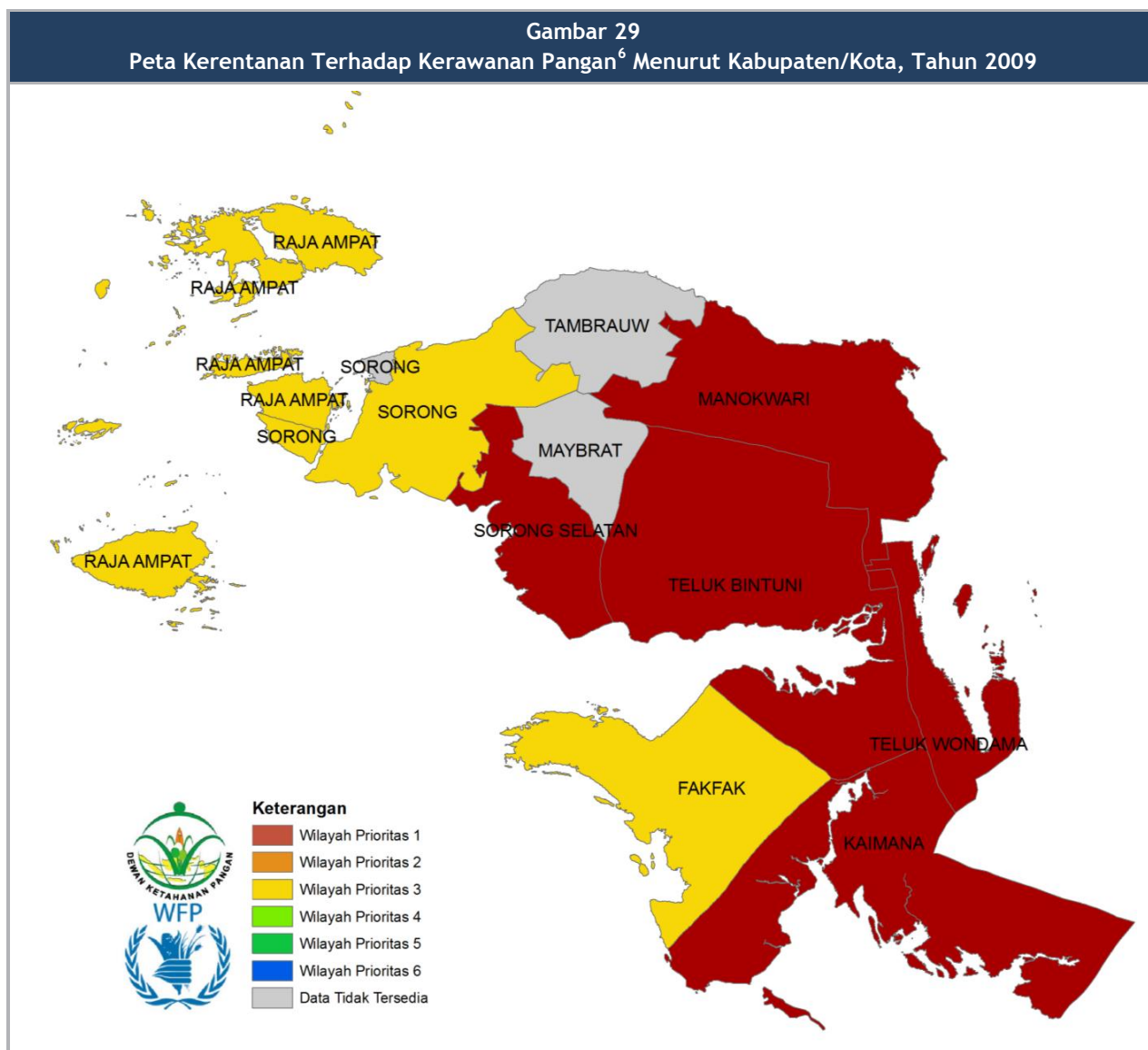
Sumber: Badan Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten, 2009 dan Papua Barat Dalam Angka (BPS), 2010.

**Keterangan:**

- >1,5 Defisit Tinggi
- 1 – 1,5 Defisit Sedang
- 0,5 – 1 Surplus Rendah
- 0 – 0,5 Surplus Tinggi
- 0 Data Tidak Tersedia

<sup>5</sup> Merupakan salah satu ukuran ketahanan pangan di tingkat Kabupaten dan Kota dan termasuk dalam Peta Kerawanan Pangan Indonesia (Food Insecurity Atlas-FIA) diperkenalkan oleh DKP, Badan Ketahanan Pangan provinsi dan kabupaten bekerja sama dengan World Food Programme (WFP) pada tahun 2005.

# KETAHANAN PANGAN



Sumber: Badan Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian RI dan WFP, 2009

<sup>6</sup> Pada tahun 2009, cakupan diperluas dari 30 provinsi di 265 kabupaten menjadi 32 provinsi dan 346 kabupaten serta merupakan konsolidasi berbagai aspek yang terkait dengan ketahanan pangan, seperti ketersediaan pangan, akses dan distribusi pangan serta gizi dan kesehatan yang dipublikasikan dengan nama “Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA)”

Tabel 10.  
Komponen Indeks Komposit Ketahanan Pangan, Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009

Daerah	Ketersediaan Pangan			Akses Pangan			Akses terhadap Kesehatan dan Gizi					Indeks Komposit Ketahanan Pangan (CFSI - Composite Food Security Index)	
	Produksi Bersih Serealia-Kab./Kota (Kg/kapita/hari)	Rasio Konsumsi Normatif-Kab./Kota	Tingkat Kemiskinan (%)	Rasio Non Elektrifikasi	Desa tanpa Akses ke Jalan (%)	Angka Buta Huruf Perempuan (%)	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Prevalensi Balita Kekurangan Gizi (%)	Penduduk tanpa akses pada fasilitas sarana kesehatan (%)	Penduduk tanpa akses pada air bersih* (%)	2009		2008
FAK FAK	43	7,03	2010 35,29	2009 14,51	2008 28,44	2009 3,33	2009 70,16	2008 31,8	2008 16,51	2009 50,48	2009	2008	403,6
KAIMANA	93	3,21	23,51	32,44	80,23	6,02	69,48	26,5	38,37	62,74			691,6
TELUK WONDAMA	64	4,66	48,47	61,49	27,87	10,71	67,25	30,3	16,39	75,16			454,5
BINTUNI	336	0,89	51,91	45,22	22,68	18,69	67,88	29,9	31,96	62,76			653,8
MANOKWARI	171	1,75	40,80	17,48	0,95	14,98	67,67	25,3	43,47	50,05			665,1
SORONG SELATAN	59	5,07	26,76	67,53	4,23	6,52	66,49	40,7	48,36	95,29			1134,7
SORONG	94	3,2	34,45	37,83	22,73	16,46	67,49	28,8	36,36	84,89			696,9
RAJA AMPAT	90	3,33	23,71	56,50	89,53	4,06	65,75	31,6	43,02	83,35			889,8
TAMBRAUW***							66,09						53,0
MAYBRAT***							66,03						53,0
KOTA SORONG**			15,12	11,15	9,09	4,00	71,53	22,3	0,00	23,21			103,0

Sumber: Badan Pusat Statistik 2011, Dewan Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian RI dan WFP, 2009.

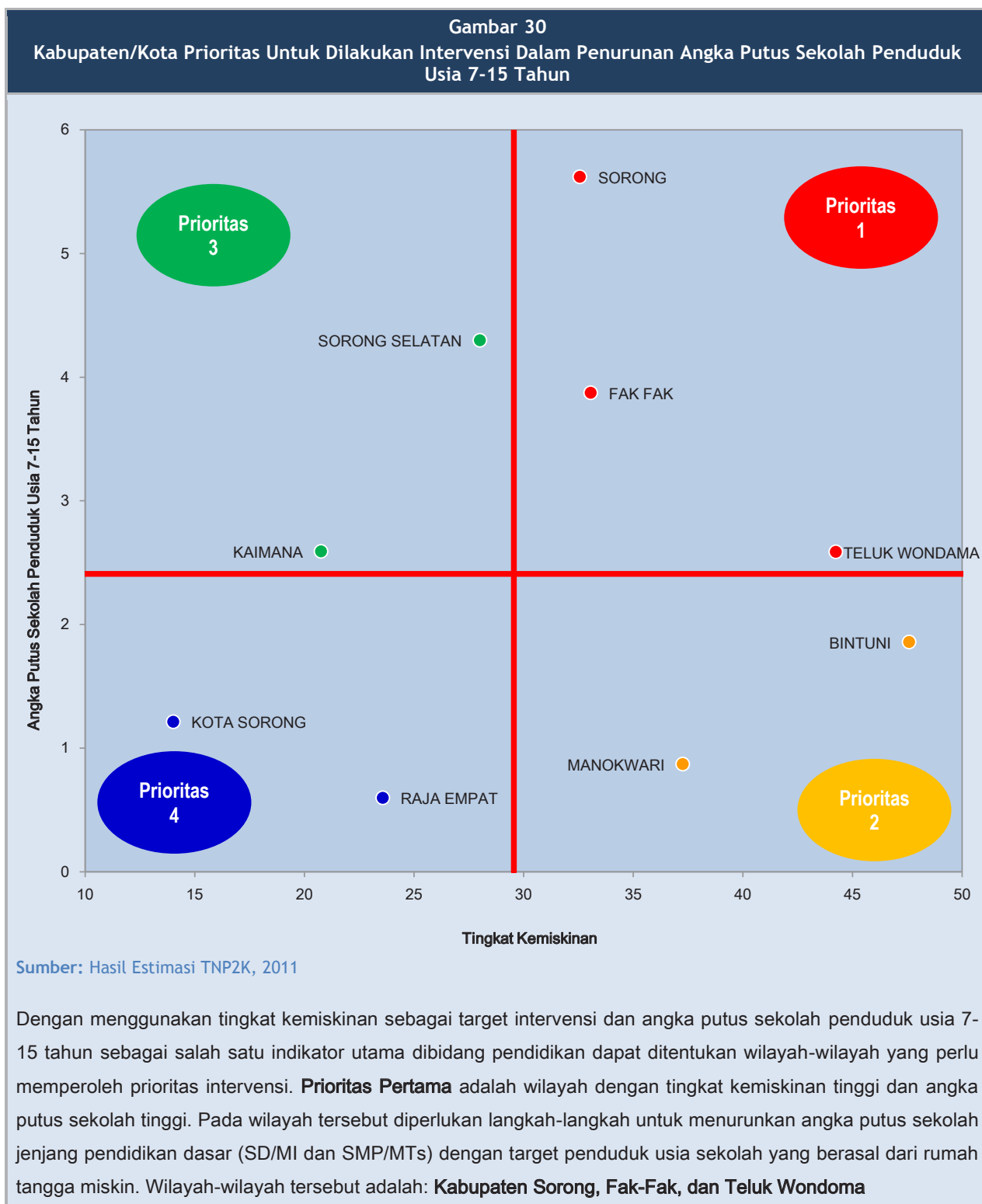
Keterangan:

\* Air Bersih dihitung menggunakan kontrol jarak dari tempat pembuangan kotoran/limbah

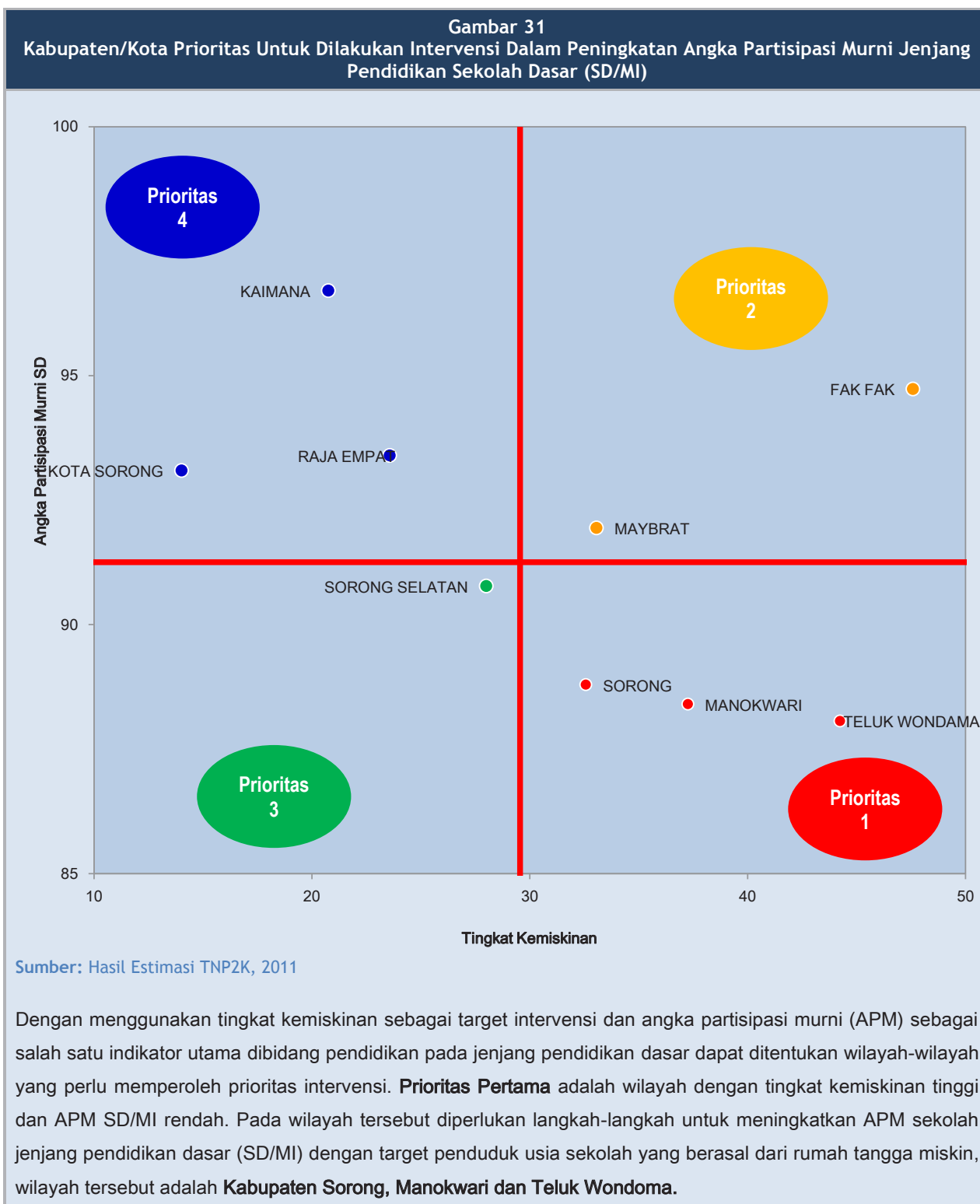
\*\* Terdaftar beberapa komponen dari Indeks Komposit Ketahanan Pangan (CFSI - Composite Food Security Index) yang tidak terhitung karena belum terdata secara lengkap.

\*\*\* Data tidak tersedia (wilayah pemekaran).

## PRIORITAS BIDANG PENDIDIKAN

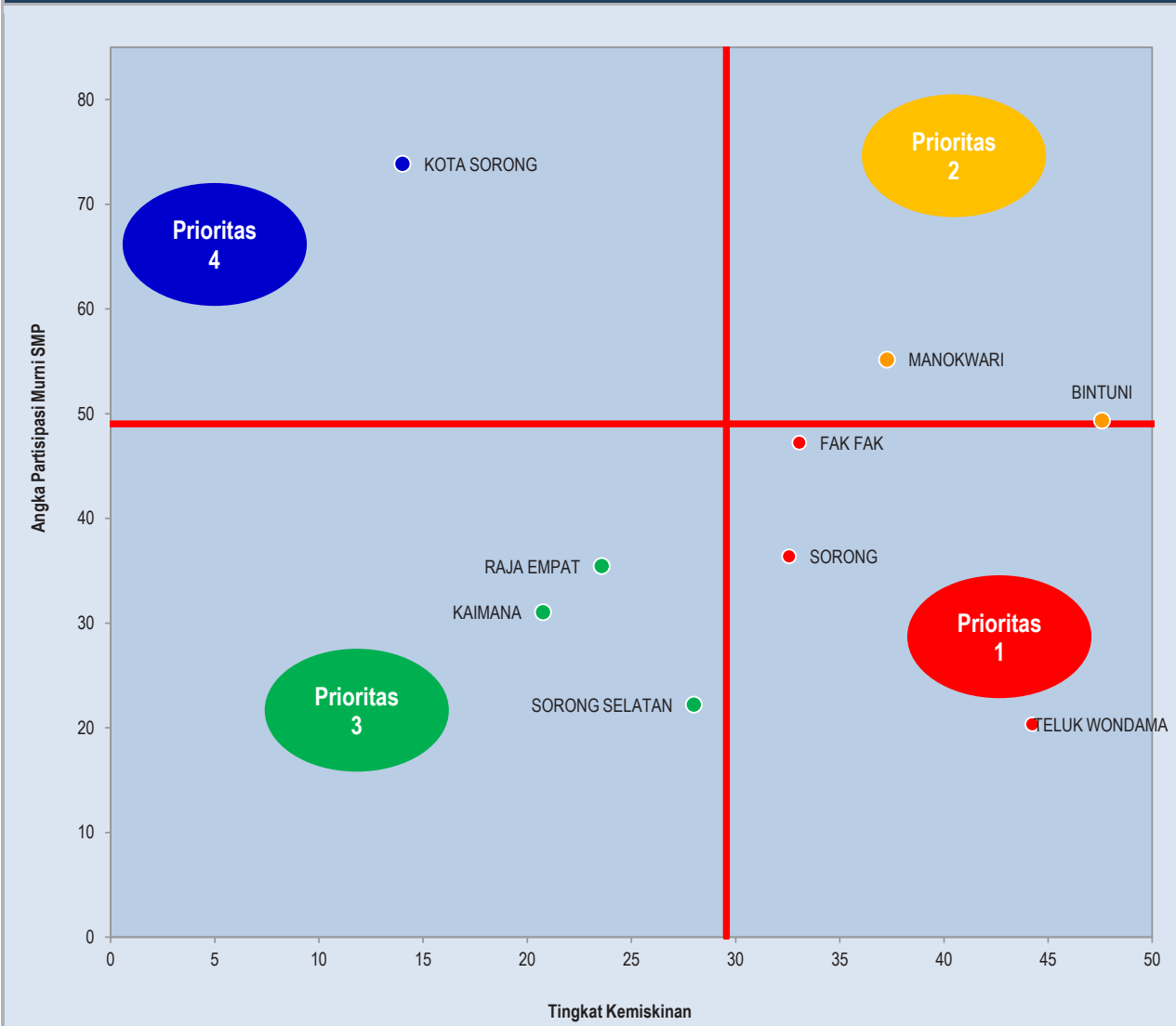


## PRIORITAS BIDANG PENDIDIKAN



# PRIORITAS BIDANG KESEHATAN

**Gambar 32**  
Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Peningkatan Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan Menengah Pertama

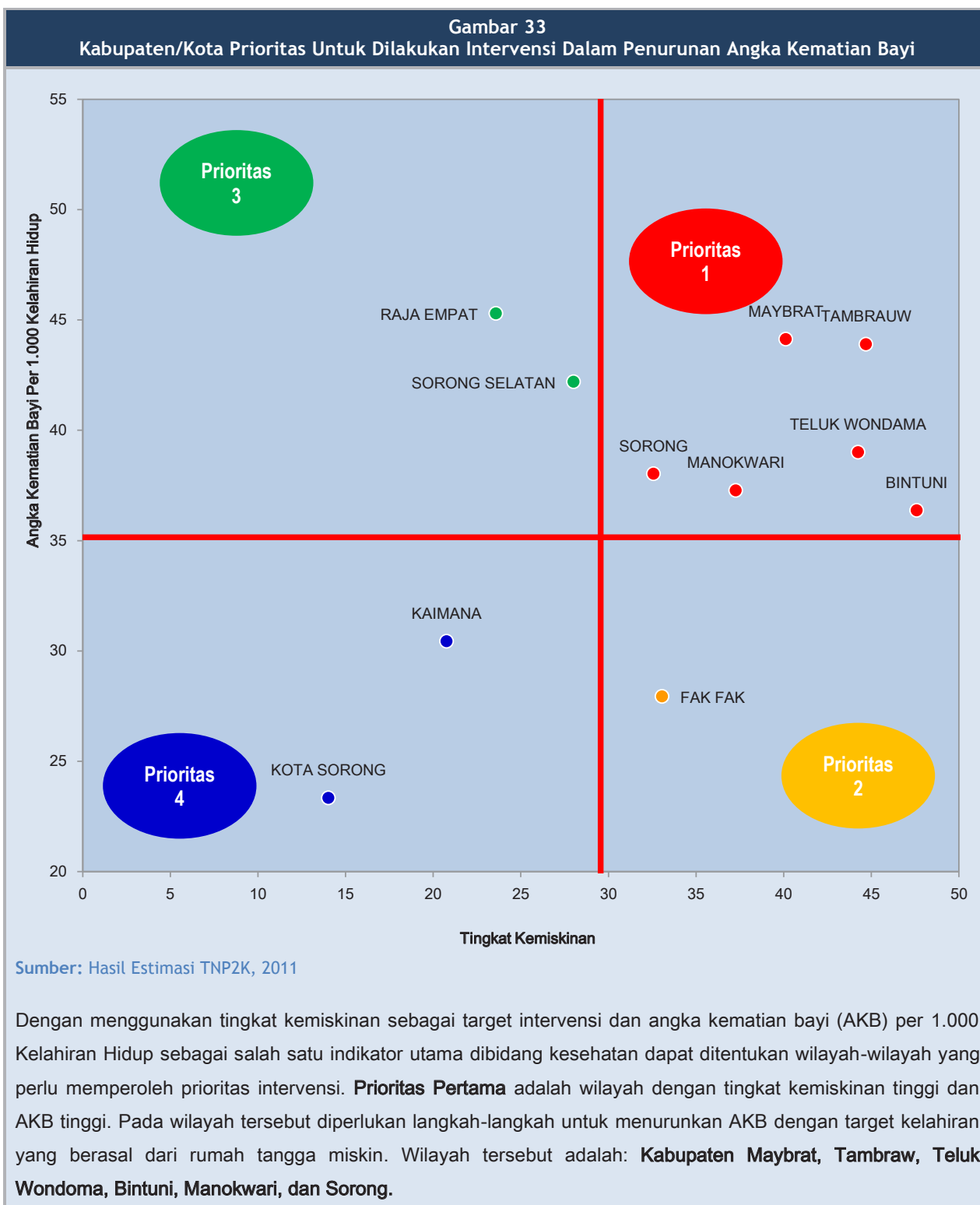


Sumber: Hasil Estimasi TNP2K, 2011

Dengan menggunakan tingkat kemiskinan sebagai target intervensi dan angka partisipasi murni (APM) sebagai salah satu indikator utama dibidang pendidikan pada jenjang pendidikan menengah pertama dapat ditentukan wilayah-wilayah yang perlu memperoleh prioritas intervensi. **Prioritas Pertama** adalah wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan APM SMP/MTs rendah. Pada wilayah tersebut diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan APM sekolah jenjang pendidikan menengah pertama (SMP/MTs) dengan target penduduk usia sekolah yang berasal dari rumah tangga miskin, wilayah tersebut adalah **Kabupaten Teluk Wondoma, Sorong dan Fak-Fak**.

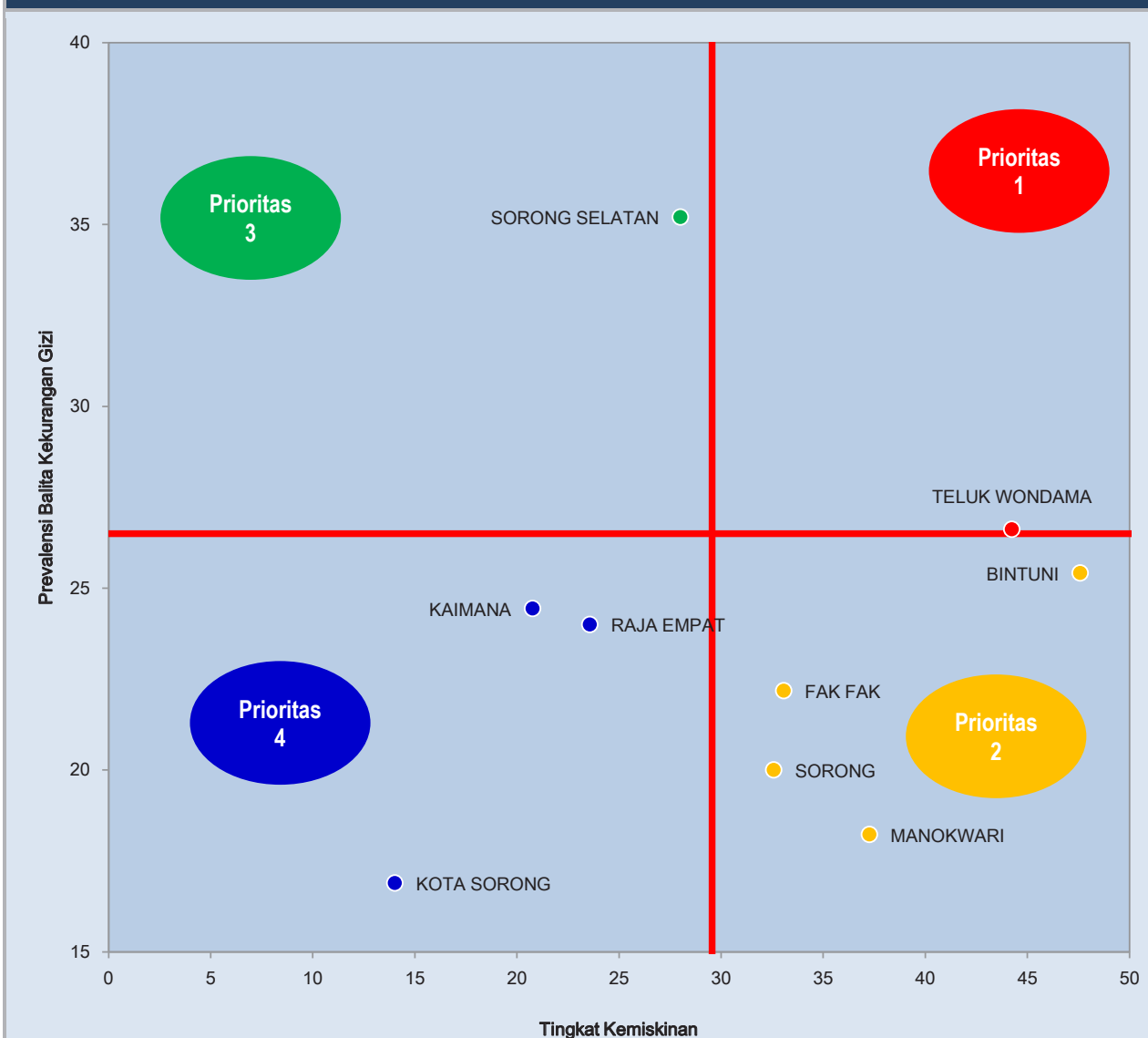


## PRIORITAS BIDANG KESEHATAN



# PRIORITAS BIDANG KESEHATAN

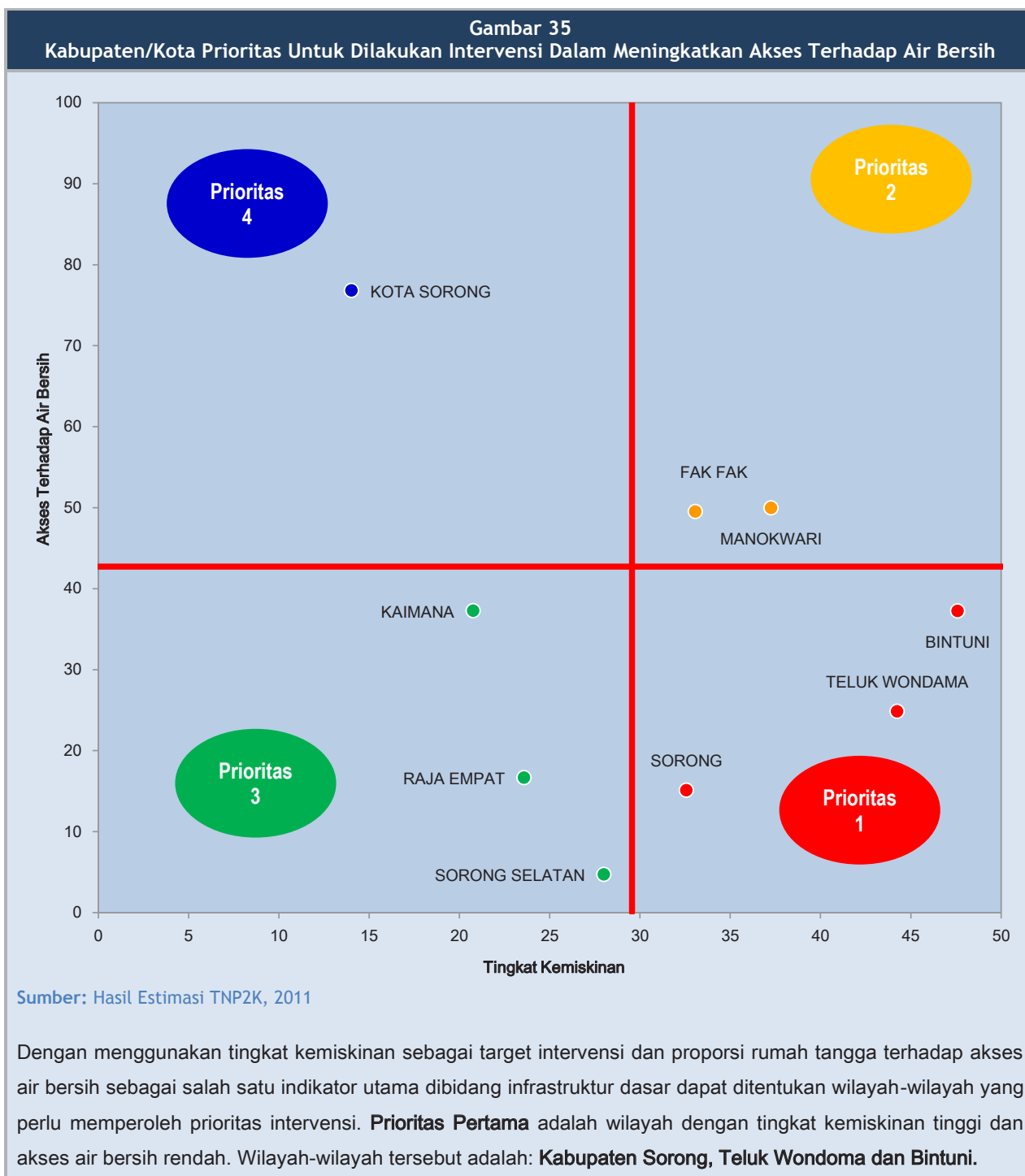
Gambar 34  
Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Penurunan Prevalensi Balita Kekurangan Gizi



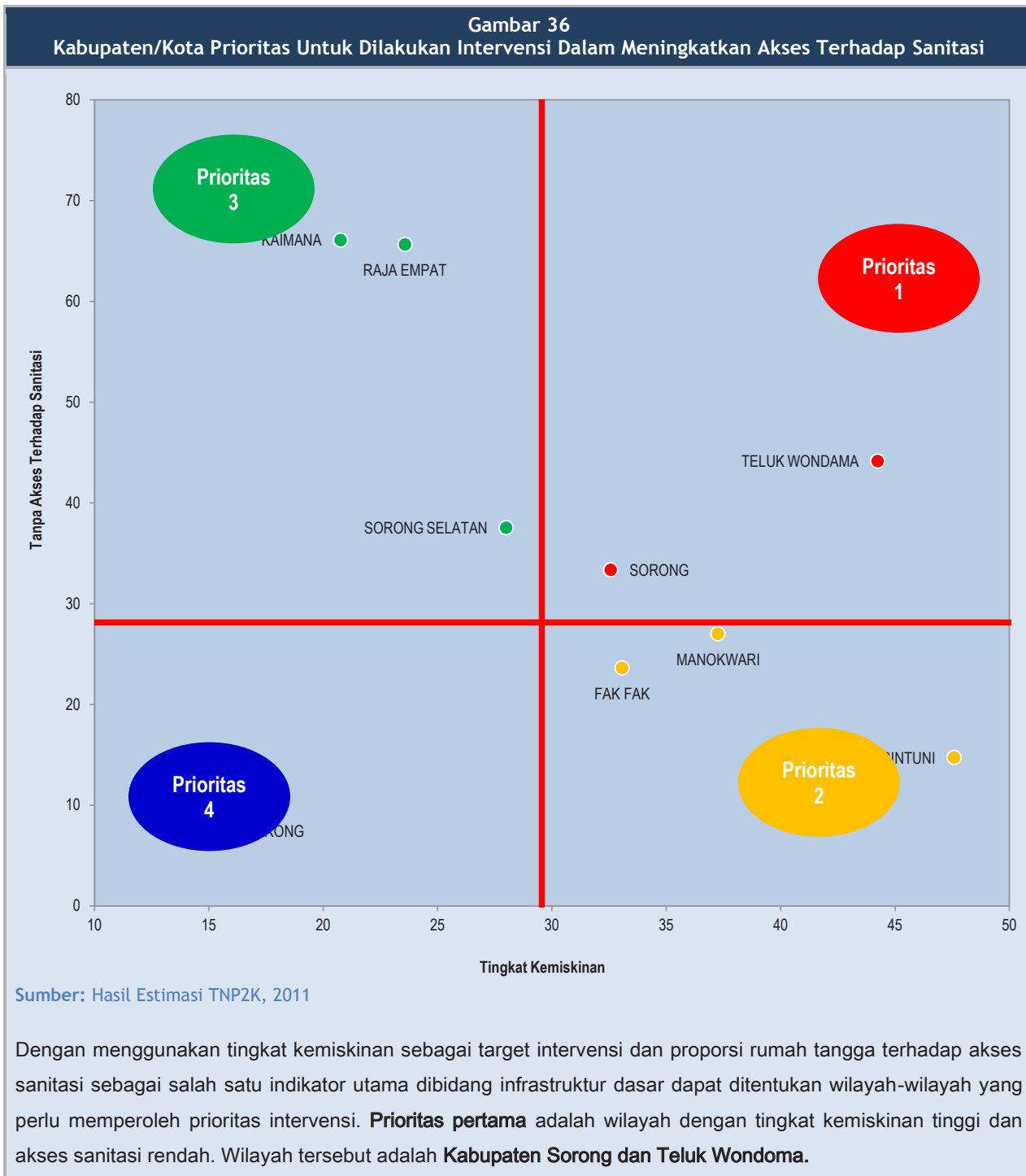
Sumber: Hasil Estimasi TNP2K, 2011

Dengan menggunakan tingkat kemiskinan sebagai target intervensi dan prevalensi balita kekurangan gizi sebagai salah satu indikator utama dibidang kesehatan dapat ditentukan wilayah-wilayah yang perlu memperoleh prioritas intervensi. **Prioritas Pertama** adalah wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan prevalensi balita kekurangan gizi tinggi. Pada wilayah tersebut diperlukan langkah-langkah untuk menurunkan prevalensi balita kekurangan gizi dengan target balita yang berasal dari rumah tangga miskin. Wilayah-wilayah tersebut diantaranya adalah: **Kabupaten Teluk Wondoma**.

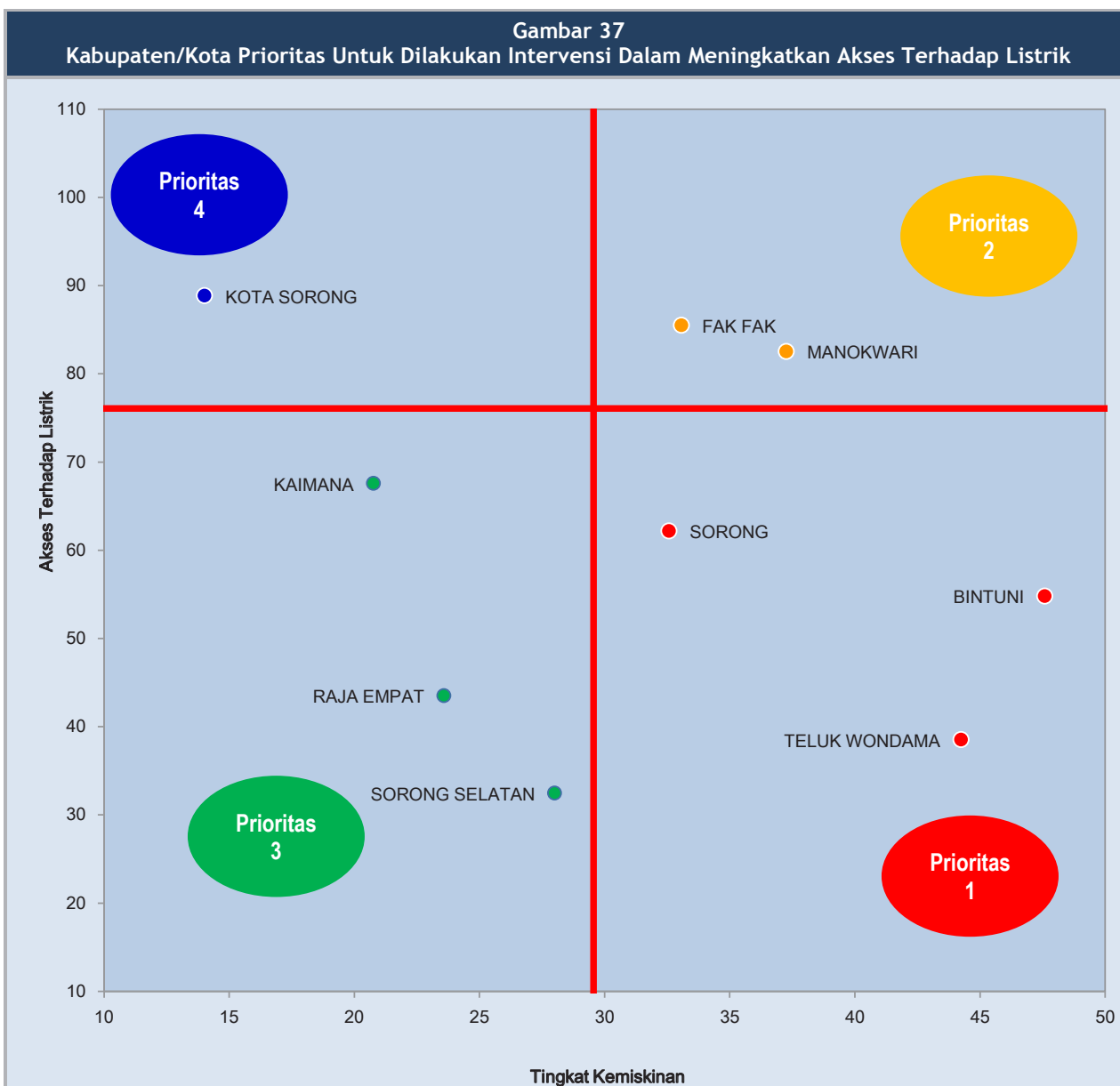
## PRIORITAS BIDANG INFRASTRUKTUR DASAR



# PRIORITAS BIDANG INFRASTRUKTUR DASAR



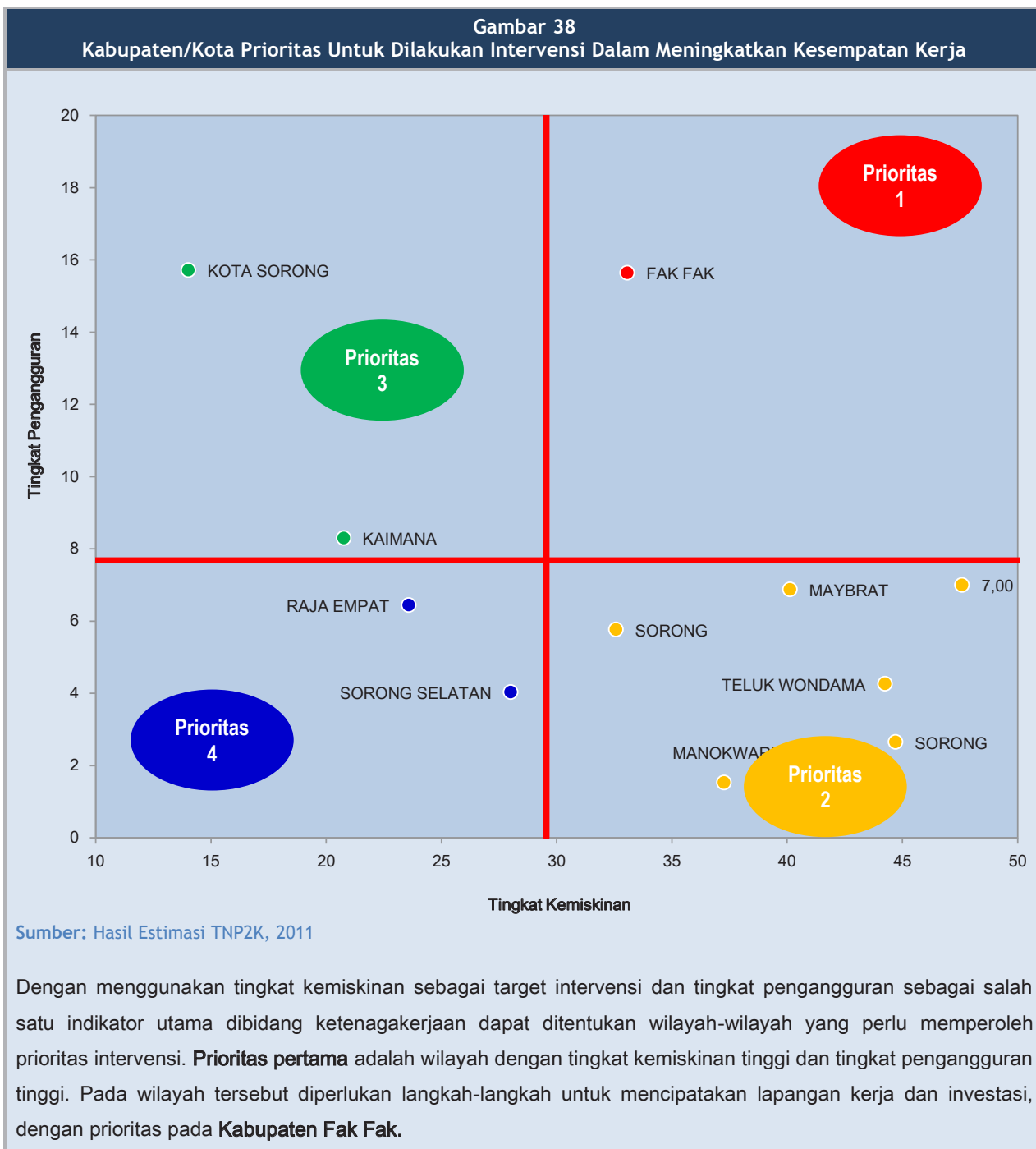
## PRIORITAS BIDANG INFRASTRUKTUR DASAR



Sumber: Hasil Estimasi TNP2K, 2011

Dengan menggunakan tingkat kemiskinan sebagai target intervensi dan proporsi rumah tangga terhadap akses tenaga listrik sebagai salah satu indikator utama dibidang infrastruktur dasar dapat ditentukan wilayah-wilayah yang perlu memperoleh prioritas intervensi. **Prioritas pertama** adalah wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan akses tenaga listrik rendah. Wilayah tersebut adalah **Kabupaten Sorong, Bintuni, dan Teluk Wondoma**.

# PRIORITAS BIDANG KETENAGAKERJAAN

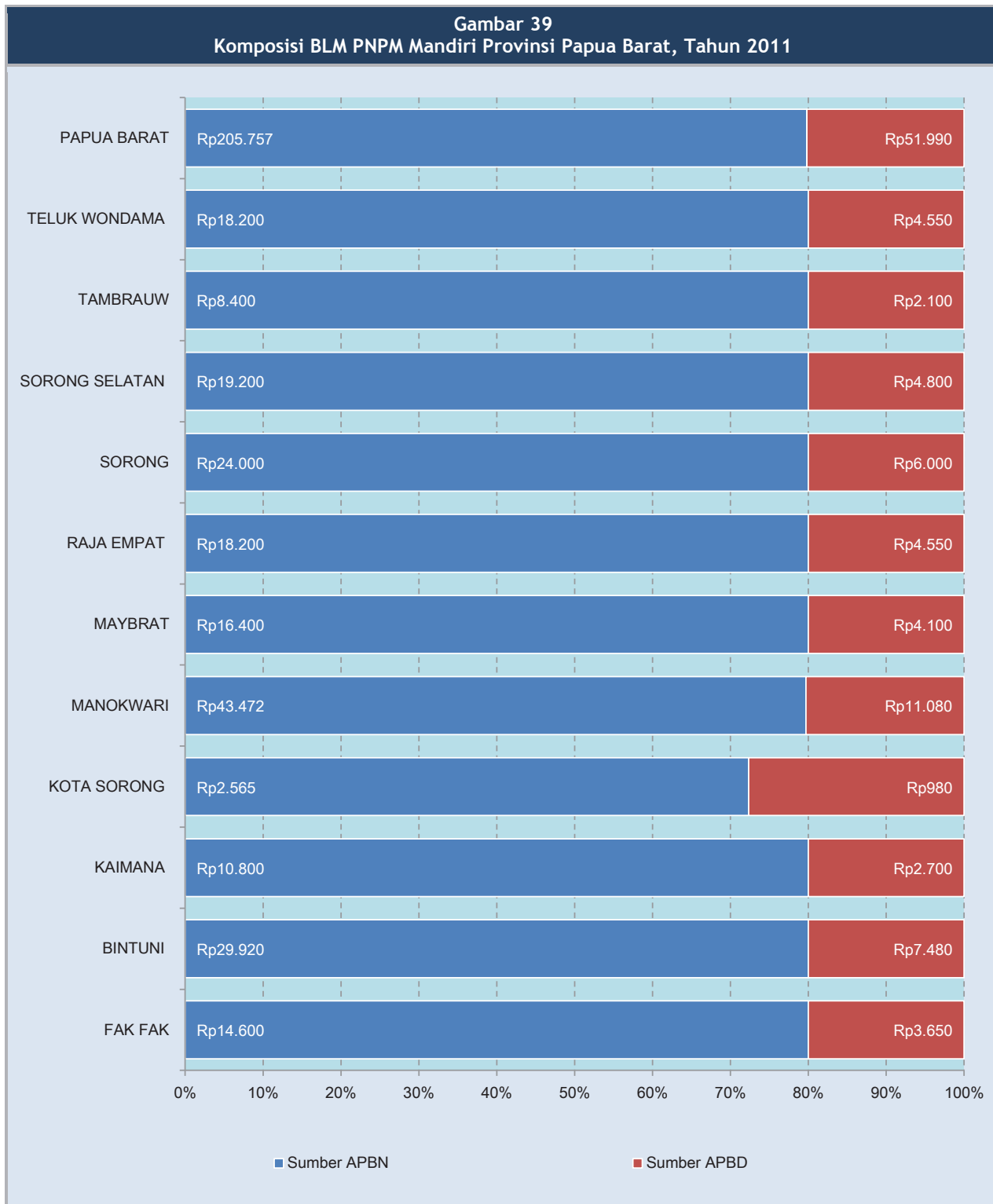


## BIDANG-BIDANG PRIORITAS KESEJAHTERAAN RAKYAT

Tabel 11  
Prioritas Intervensi Menurut Kabupaten Kota

Kabupaten/Kota	Angka Putus Sekolah Usia 7-15 Th	Angka Partisipasi Murni SD/MI	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	AKB Per 1.000 Kelahiran Hidup	Prevalensi Balita Kurang Gizi	Akses Terhadap Air Bersih	Akses Terhadap Sanitasi	Akses Terhadap Listrik	Tingkat Pengangguran
TELUK WONDAMA	1	1	1	1	1	1	1	1	2
SORONG	1	1	1	1	2	1	1	1	2
BINTUNI	2	2	2	1	2	1	2	1	2
FAK FAK	1	2	1	2	2	2	2	2	1
MANOKWARI	2	1	2	1	2	2	2	2	2
SORONG SELATAN	3	3	3	3	3	3	3	3	4
KAIMANA	3	4	3	4	4	3	3	3	3
RAJA EMPAT	4	4	3	3	4	3	3	3	4
KOTA SORONG	4	4	4	4	4	4	4	4	3
MAYBRAT*	0	0	0	1	0	0	0	0	2
TAMBRAUW*	0	0	0	1	0	0	0	0	2

Sumber: Ringkasan Hasil Estimasi TNP2K, 2011



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2011.

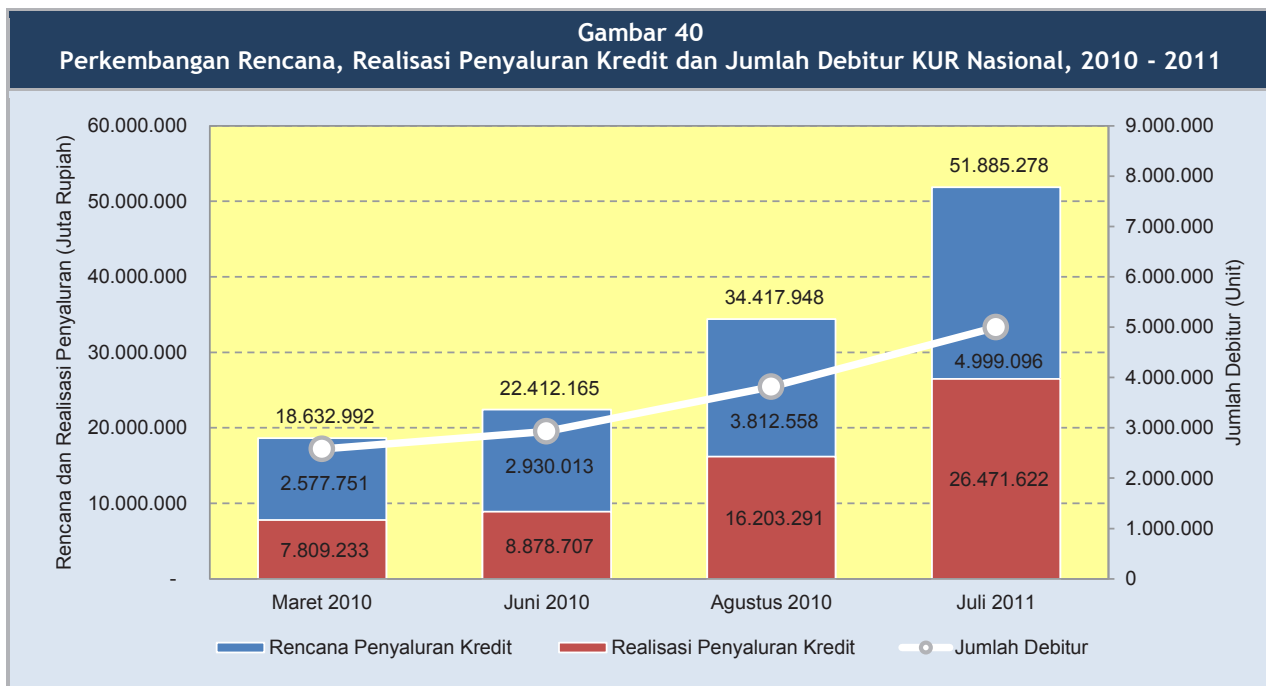


Tabel 12.  
Komposisi BLM PNPM Mandiri Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2011

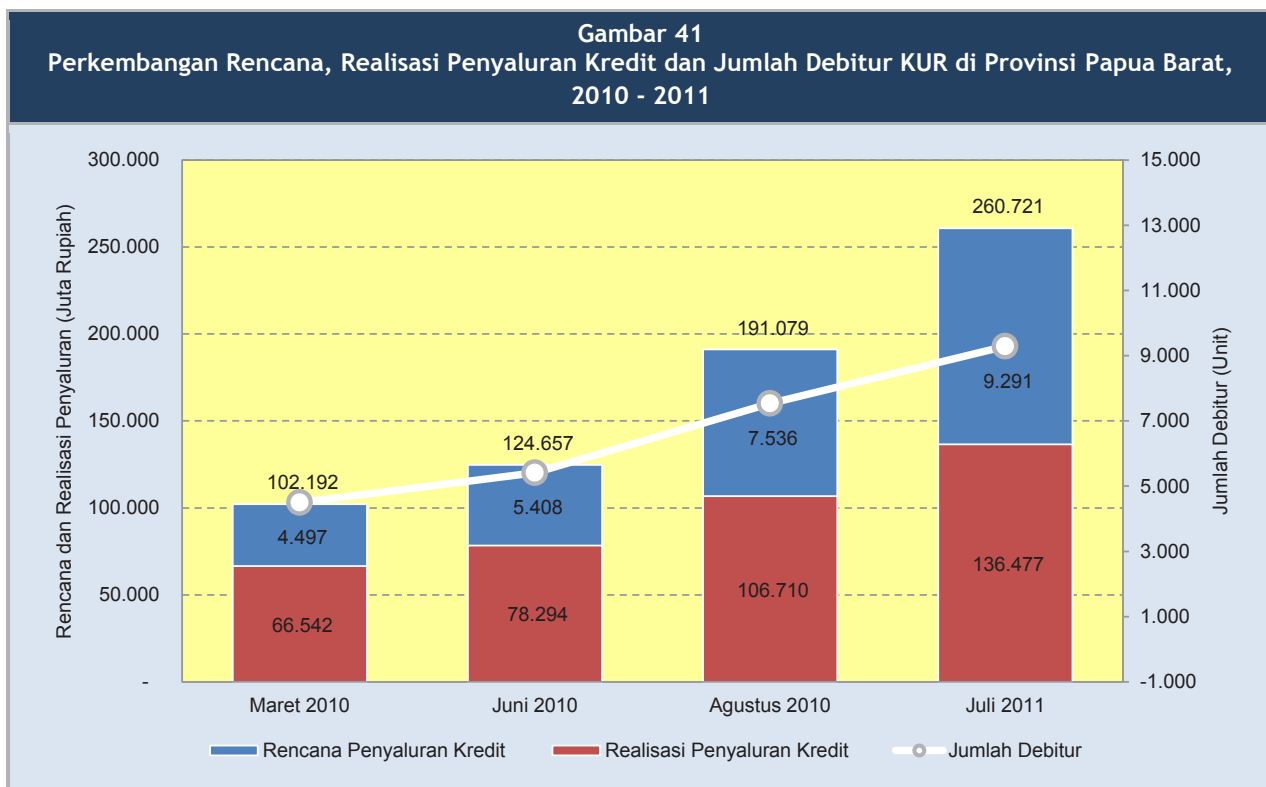
Daerah	PNPM Perdesaan	PNPM Perkotaan	Total Alokasi BLM	Sumber APBN	Sumber APBD	Jumlah Kecamatan
	Juta Rp	Juta Rp	Juta Rp	Juta Rp	Juta Rp	Kec.
FAK FAK	18.250		18.250	14.600	3.650	9
BINTUNI	37.400		37.400	29.920	7.480	24
KAIMANA	13.500		13.500	10.800	2.700	7
KOTA SORONG		3.545	3.545	2.565	980	5
MANOKWARI	52.850	1.702	54.552	43.472	11.080	29
MAYBRAT	20.500		20.500	16.400	4.100	11
RAJA EMPAT	22.750		22.750	18.200	4.550	13
SORONG	30.000		30.000	24.000	6.000	15
SORONG SELATAN	24.000		24.000	19.200	4.800	13
TAMBRAUW	10.500		10.500	8.400	2.100	6
TELUK WONDAMA	22.750		22.750	18.200	4.550	13
<b>PAPUA BARAT</b>	<b>252.500</b>	<b>5.247</b>	<b>257.747</b>	<b>205.757</b>	<b>51.990</b>	<b>145</b>

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2011.

# KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)

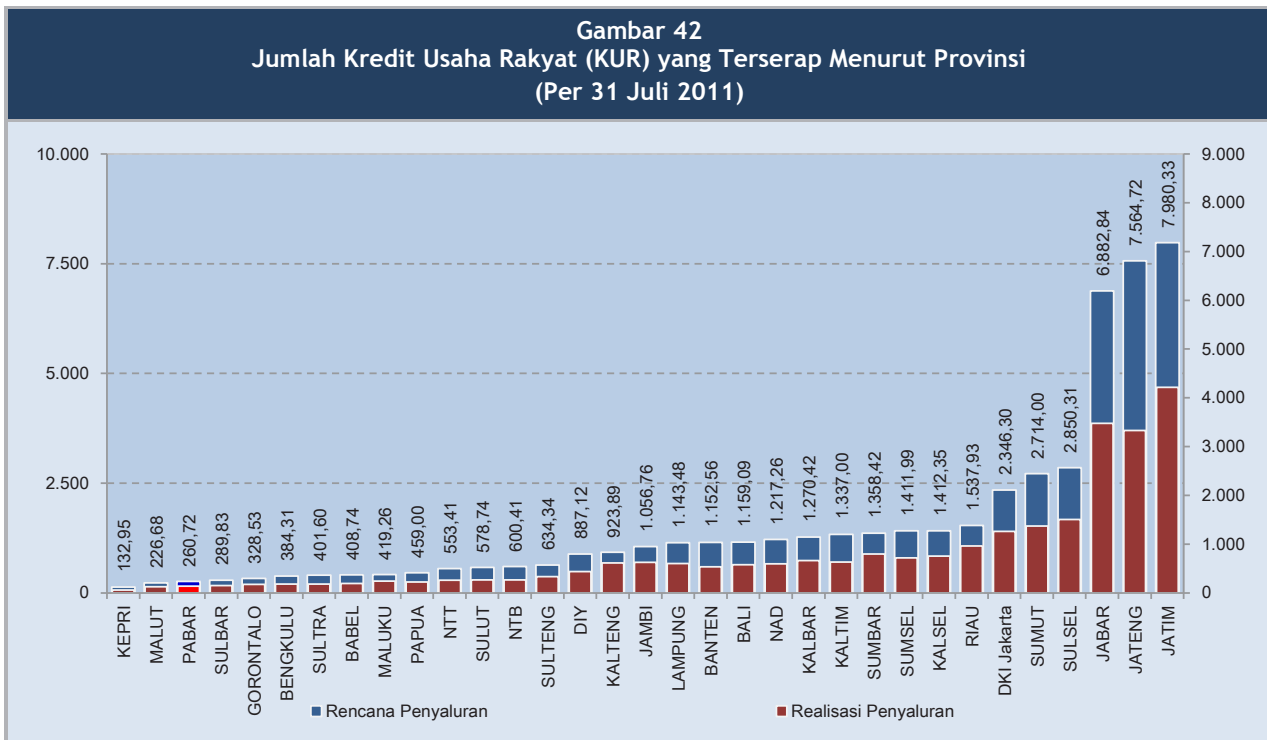


Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011

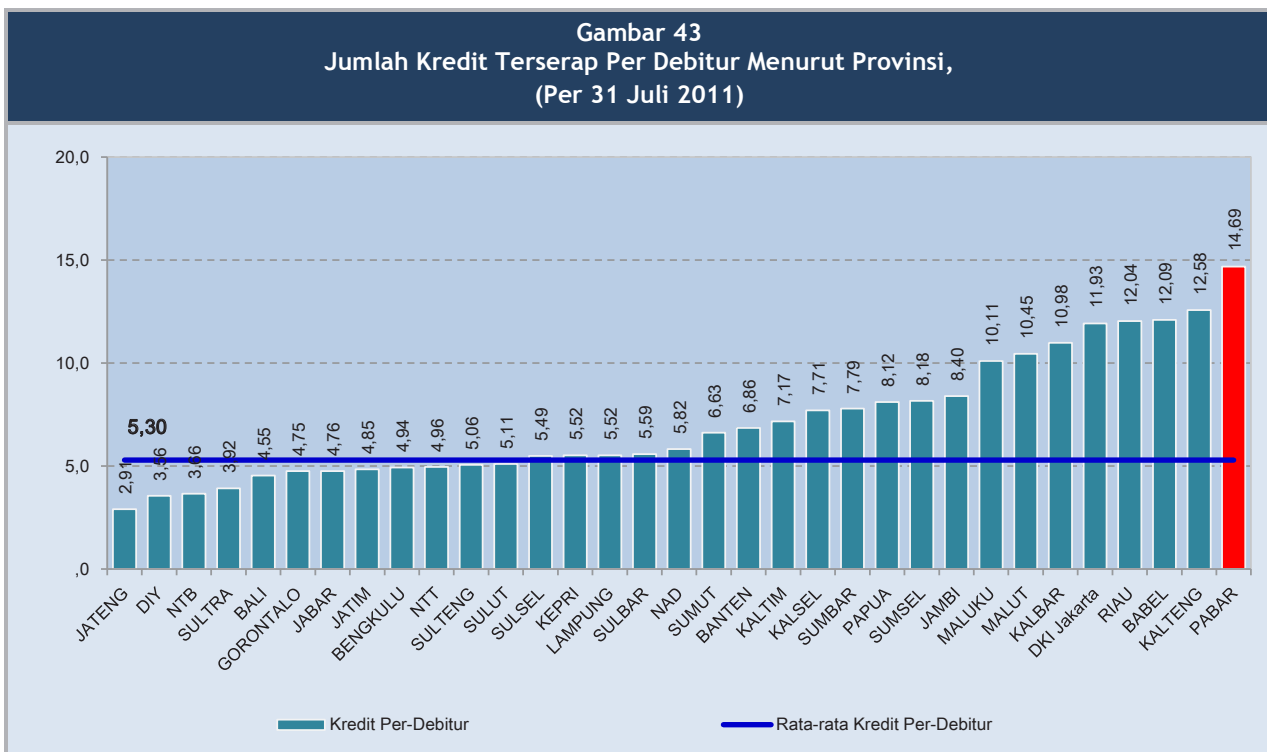


Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011

## KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)

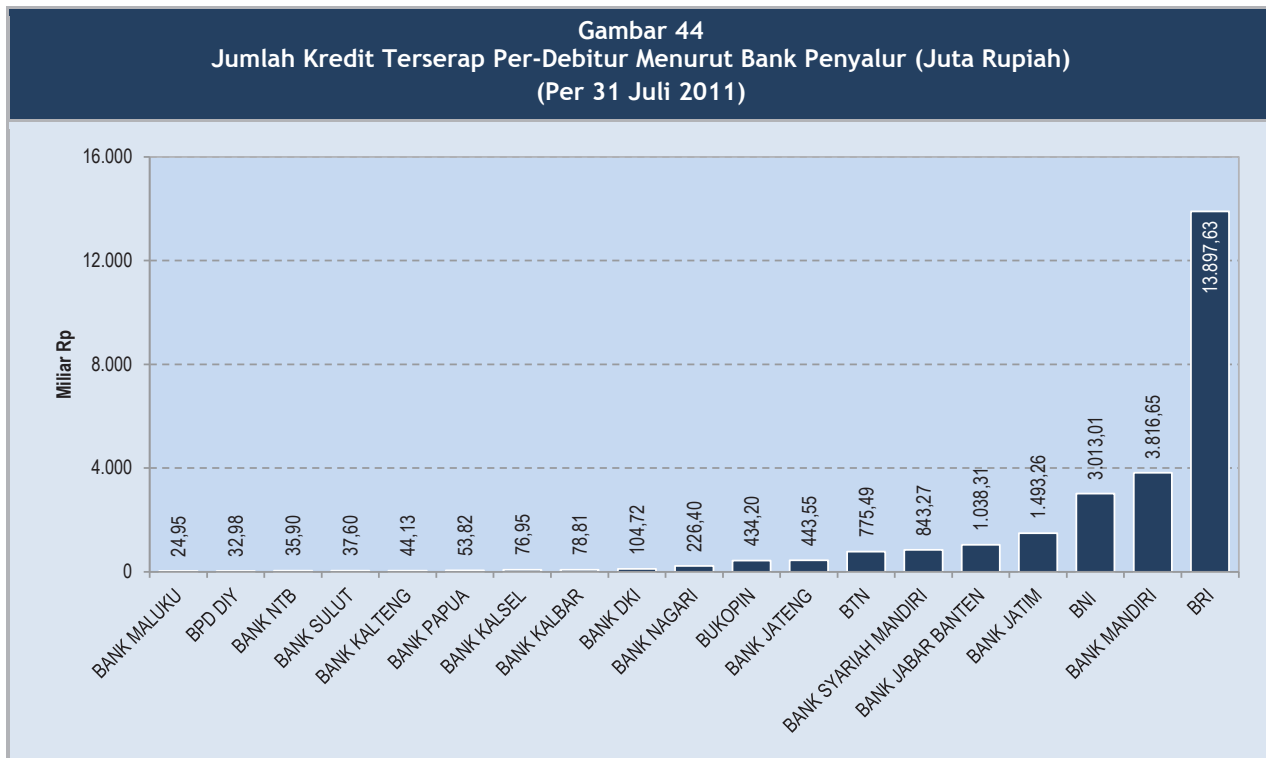


Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011

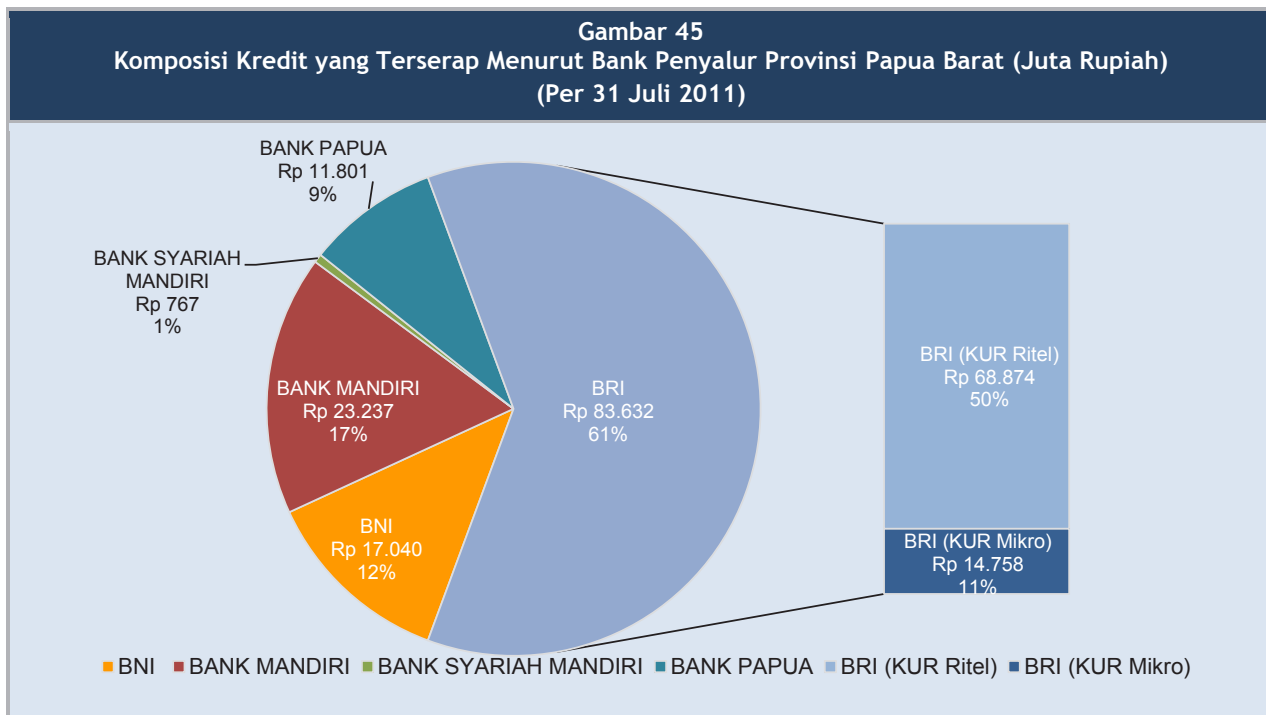


Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011

## KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)

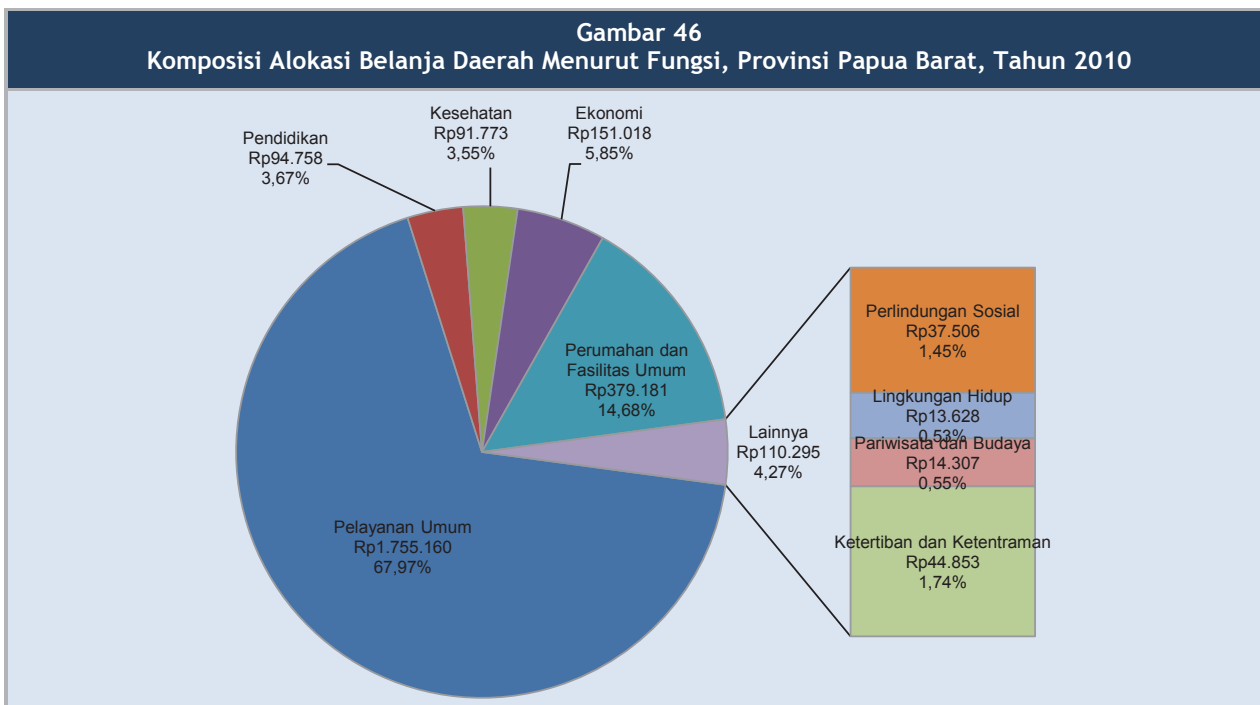


Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011

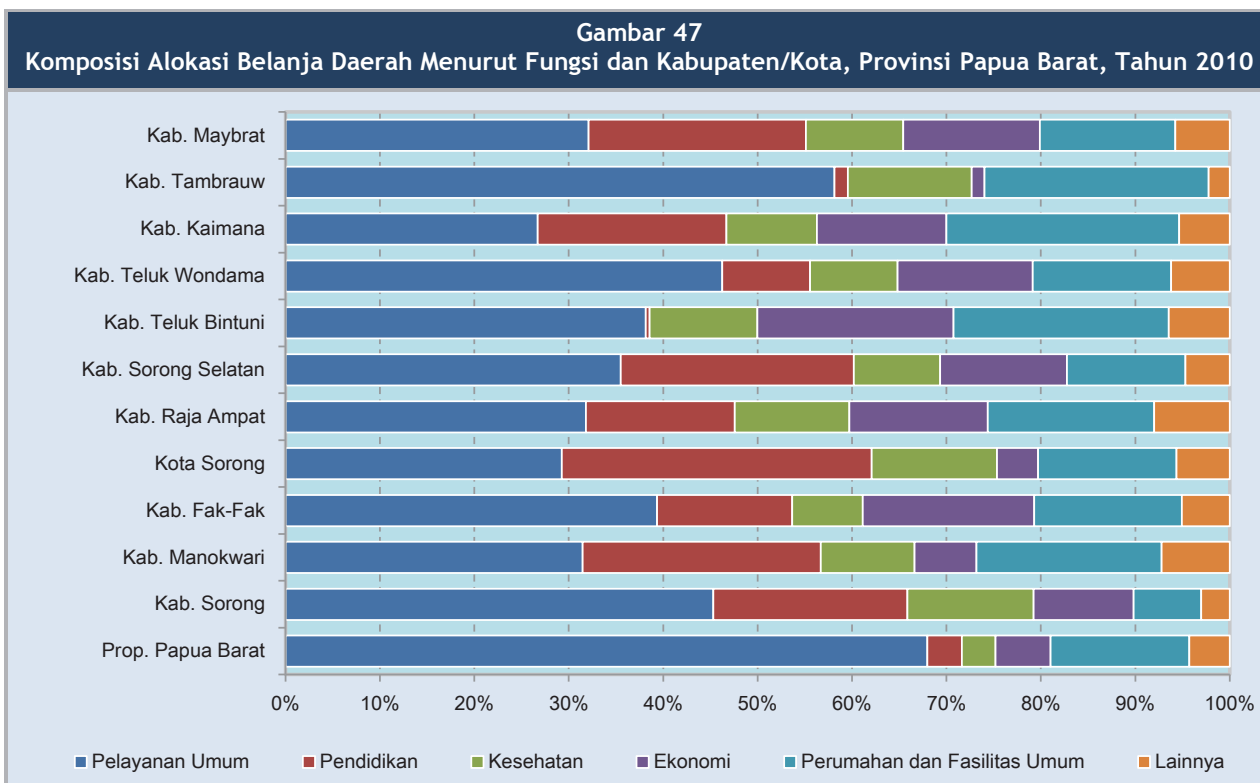


Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011

# ANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH



Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, 2010



Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, 2010